

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG LAÏCITÉ TAHUN 2004
DAN POSISI KAUM WANITA MUSLIM IMIGRAN
MAGRIBI PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN
JACQUES CHIRAC (1995 – 2007) DI PRANCIS**

SKRIPSI

OLEH :

**NURAINI INDAH WARDANI
NIM 125110301111001**



**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA PRANCIS
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2016**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG LAÏCITÉ TAHUN 2004 DAN
POSISI KAUM WANITA MUSLIM IMIGRAN MAGRIBI PADA
ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN JACQUES CHIRAC (1995 –**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Brawijaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sastra**

OLEH :
NURAINI INDAH WARDANI
NIM 125110301111001

**PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA PRANCIS
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Nuraini Indah Wardani

NIM : 125110301111001

Program Studi : Bahasa dan Sastra Prancis

Universitas menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya saya, bukan merupakan jiplakan dari karya lain, dan belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi manapun.
2. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang diberikan.

Malang, 30 Maret 2016

Nuraini Indah Wardani
NIM. 125110301111001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Nuraini Indah Wardani
telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.

Malang, 29 Maret 2016
Pembimbing

Lusia Neti Harwati, M.Ed.
NIP. 19780607 200212 2 002



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi Sarjana atas nama Nuraini Indah Wardani
telah disetujui oleh Dewan Pengaji sebagai syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana.

Rosana Hariyanti, M.A., Ketua Dewan Pengaji
NIP. 19710806 200501 2 009

Lusia Neti Harwati, M.Ed., Anggota Dewan Pengaji
NIP. 19780607 200212 2 002

Mengetahui,

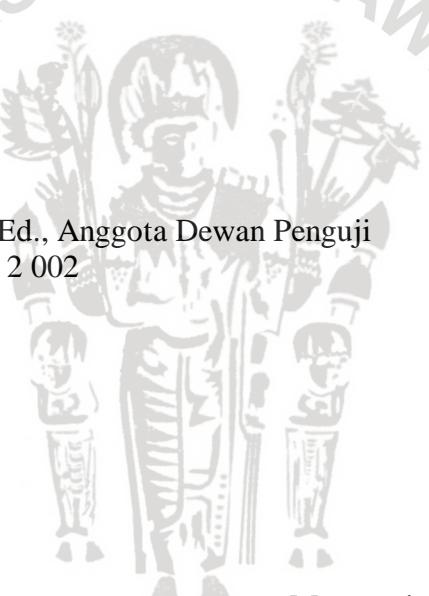
Ketua Program Studi
Bahasa dan Sastra Prancis

Rosana Hariyanti, M.A.
NIP. 19710806 200501 2 009

Menyetujui,

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra

Ismatul Khasanah, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19750518 200501 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul

“Penerapan Undang-Undang Laïcité Tahun 2004 dan Posisi Kaum Wanita

Muslim Imigran Magribi pada Era Pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995

- 2007) di Prancis”.

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sastra (S.S) pada Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Jurusan

Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi, penulis tidak terlepas dari dukungan serta

bimbingan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keempat orang tua penulis, Bapak, Mama, Ayah dan Ibu, serta ketiga

saudara penulis, kakak Ghian, Rachmat dan Kynan yang senantiasa

memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.

2. Dosen Pembimbing Skripsi, Madame Lusia Neti Harwati, M.Ed yang

senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga laporan

skripsi dapat diselesaikan dengan baik.

3. Dosen Pembimbing Akademik, Madame Siti Khusnul Khotimah, M.A.

4. Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Brawijaya, Madame Rosana Hariyanti, M.A.

5. Seluruh Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu

Budaya, Universitas Brawijaya.

6. Teman-teman Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Fakultas Ilmu

Budaya, Universitas Brawijaya, khususnya angkatan 2012 yang senantiasa

memberikan dukungan dan semangat.

7. Sahabat penulis, Nadhira Nur Aulia, SAB yang senantiasa memberikan

dukungan serta semangat kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat : Fefty, Dewi, Venti, Vicky, Mayani, Beetha, Diyah, Riza,

Evy, Endang, Siska, Mia, Hanif, Reza, Karateka INKAI, Senggani 6A dan

teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih

atas dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dari berbagai

pihak. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penulisan

skripsi. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para mahasiswa

Brawijaya.

Malang, 30 Maret 2016

Nuraini Indah Wardani

ABSTRAK

Wardani, Nuraini Indah. 2016. **Penerapan Undang-Undang Laïcité Tahun 2004 dan Posisi Kaum Wanita Muslim Imigran Magribi pada Era Pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995 – 2007) di Prancis.** Program Studi Bahasa dan Sastra Prancis, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.
Pembimbing : Lusia Neti Harwati

Kata Kunci : Imigran, Magribi, Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004, Jilbab.

Pada tahun 2004, Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 lahir dan diterapkan di seluruh sekolah publik di Prancis. Penerapan undang-undang tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap wanita-wanita muslim yang tengah menempuh pendidikan mereka di sekolah publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis serta cara-cara yang dilakukan oleh para pelajar muslim dalam mempertahankan identitas agama mereka sejak diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di sekolah-sekolah publik Prancis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori multikausalitas dan teori deskriptif kausalitas. Penelitian ini menggunakan dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kausal komparatif.

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi lahir dan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis, yaitu faktor sejarah, sosial dan politik. Lahir dan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 seolah membatasi ruang gerak para pelajar muslim selama di lingkungan sekolah. Terdapat tiga cara yang dilakukan para pelajar muslim dalam mempertahankan identitas agama mereka, yaitu dengan tetap menggunakan jilbab, menggunakan rambut palsu dan melepas jilbab.

Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai adakah keterkaitan antara Undang-undang *Laïcité* tahun 2004 dengan peraturan pelarangan penggunaan cadar di Prancis serta dampak apa saja ditimbulkan bagi kaum wanita muslim di Prancis.

EXTRAIT

Wardani, Nuraini Indah. 2016. **L'application De La Loi De La Laïcité De 2004 Et La Position Des Femmes Musulmanes Immigrantes Maghrébines Dans L'ère Du Gouvernement Du Président Jacques Chirac (1995 – 2007) En France.** La section de langue et littérature française, Le département de langue et littérature, La Faculté des Sciences Culturelles, L'université Brawijaya.
Superviseur: Lusia Neti Harwati

Mot-clés : L'immigrant, Maghreb, La loi de la *Laïcité* de 2004, Le voile.

En 2004, la loi de la *Laïcité* de 2004 a été adoptée et a été appliquée dans toutes les écoles publiques en France. L'application de cette loi prévoit un impact considérable pour les musulmanes qui étudient à l'école publique.

Cette étude vise à déterminer les facteurs qui constituent l'arrière-fond d'application de la loi de la *Laïcité* de 2004 en France et des moyens qui sont utilisés par les élèves musulmanes pour maintenir leur identité religieuse depuis l'application de cette loi. Il y a deux théories qui sont utilisées dans cette étude, ce sont la théorie de la multi-causalité et la théorie de la descriptive causalité. Cette étude utilise deux méthodes de recherche qui sont la recherche descriptive qualitative et la recherche causale comparative.

Les résultats de cette étude indiquent qu'il y a trois facteurs qui constituent l'arrière-fond d'application de la loi de la *Laïcité* de 2004 en France. Ce sont le facteur historique, social, et politique. L'existence et l'application de cette loi, c'est comme si le gouvernement limitait la liberté les élèves musulmanes dans les écoles. Il y a trois moyens qui sont réalisés par des élèves musulmanes pour maintenir leur identité religieuse, ce sont l'utilisation du voile, l'utilisation de perruques et le non-port du voile.

L'auteur suggère que la future étude pourra analyser s'il y a une relation entre la loi de la *Laïcité* de 2004 avec l'interdiction de l'utilisation du voile (Burqa) en France, ainsi que tout impact causé aux musulmanes en France.

DAFTAR ISI

SAMPUL BAGIAN DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

EXTRAIT

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang
1.2	Rumusan Masalah
1.3	Tujuan Penelitian
1.4	Manfaat Penelitian
1.5	Ruang Lingkup Penelitian
1.6	Definisi Istilah Kunci

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Teori Multikausalitas
2.2	Teori Deskriptif Kausalitas
2.3	Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian
3.2	Sumber Data
3.3	Teknik Pengumpulan Data
3.4	Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Lahirnya Undang-	Undang <i>Laïcité</i> Tahun 2004 di Prancis	20
4.1.1 Faktor Sejarah	21
4.1.2 Faktor Sosial	24
4.1.3 Faktor Politik	34
4.2 Cara Muslimah Magribi Menunjukkan Identitas Agama Islam dalam Dunia Pendidikan di Prancis	36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

CATATAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---|---|
| 1 | Konstitusi 9 Desember 1905 |
| 2 | Konstitusi 4 Oktober 1958 |
| 3 | Undang-Undang <i>Laïcité</i> Tahun 2004 |
| 4 | Pidato Presiden Jacques Chirac 17 Desember 2003 |
| 5 | <i>Curriculum Vitae</i> |
| 6 | Berita Acara Bimbingan Skripsi |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Magribi menurut Suharso dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia edisi lux (2014, hal. 303) adalah negara-negara Islam yang berada di wilayah Afrika Utara. Contoh, Aljazair, Tunisia, Maroko. Suharso (2014, hal. 178) menjelaskan tentang pengertian imigran yaitu orang-orang asing yang masuk ke dalam suatu negara untuk tinggal dan menetap di negara tersebut.

Sementara itu menurut *Le Haut Conseil à l'Intégration*,

"un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré". ("Imigran adalah seseorang yang lahir di negara lain dan kemudian menetap di Prancis. Orang-orang berkewarganegaraan Prancis yang lahir di luar negeri dan tinggal di Prancis tidak termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya imigran tertentu dapat menjadi warga negara Prancis, sementara yang lainnya tetap menjadi orang asing. Populasi orang asing dan imigran tidak sepenuhnya dapat disamakan, seorang imigran belum tentu orang asing dan sebaliknya, beberapa orang asing lahir di Prancis (kelas ke dua). Kualitas imigran adalah tetap; seorang individu tetaplah imigran bahkan jika menjadi warga Prancis melalui naturalisasi. Negara tempat kelahiran seseorang dan bukan negara tempat orang tersebut memperoleh kewarganegaraanlah, yang menentukan geografis asal seorang imigran")

Menurut *Le Haut Conseil à l'Intégration*, imigran adalah orang-orang yang lahir di luar teritori Prancis dan tinggal menetap di Prancis. Orang-orang tersebut dapat menjadi warga negara Prancis melalui naturalisasi, tetapi tidak menghilangkan status asal mereka.

Berdasarkan ketiga pengertian mengenai imigran dan Magribi, dapat disimpulkan bahwa imigran Magribi adalah orang-orang dari negara-negara Magribi yang masuk ke dalam suatu negara, dalam hal ini negara Prancis, untuk tinggal dan menetap di negara tersebut.

Menurut Pabottinggi dan kawan-kawan (2008, hal. 60) migrasi pertama kaum imigran Magribi ke Prancis terjadi pada era Perang Dunia I. Pada saat itu kaum imigran Magribi dibutuhkan sebagai prajurit-prajurit perang Prancis. Migrasi ke dua terjadi setelah Perang Dunia I, sekitar tahun 1920. Kaum imigran Magribi bekerja sebagai buruh di Prancis. Kaum imigran Magribi datang dan tinggal di Prancis dengan beberapa alasan. Alasan utama adalah mereka ingin mendapatkan pekerjaan di Prancis. Selain itu, beberapa dari mereka datang ke Prancis dengan alasan untuk mengikuti keluarga yang telah tinggal terlebih dahulu di Prancis ataupun untuk menuntut ilmu.

Setiap tahun jumlah imigran di Prancis terus bertambah. Berdasarkan data statistik dari INSEE (*L'Institut national de la statistique et des études économiques*) pada tahun 2013, 8,8% dari penduduk Prancis adalah imigran. 30% dari imigran di Prancis adalah imigran Magribi. Meningkatnya jumlah imigran Magribi di Prancis memicu pesatnya perkembangan agama Islam di negara

tersebut. Akan tetapi, perkembangan agama Islam di Prancis mengalami hambatan

setelah diberlakukannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Lahirnya undang-

undang tersebut disinyalir mempengaruhi kebebasan beragama kaum muslim

Magribi, khususnya kaum wanita muslim (muslimah) di Prancis.

Sebelum lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004, Bowen di dalam

bukunya *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public*

Space (2010, hal. 20) menjelaskan bahwa pada tahun 1905 terdapat Konstitusi

yang mengatur tentang hubungan pemerintahan dan gereja di negara Prancis.

Pemisahan antara gereja dan agama secara tegas dijelaskan dalam Konstitusi⁹

Desember 1905. Berdasarkan Konstitusi 4 Oktober 1958, Prancis adalah negara

yang menganut paham sekulerisme, yaitu memisahkan hubungan antara agama

dan pemerintahan. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa tidak adanya pengakuan

dan jaminan terhadap setiap agama di Prancis. Hal ini bertujuan agar adanya

persamaan bagi seluruh warga negara Prancis tanpa adanya pembedaan seperti ras

dan agama. Namun, di Prancis setiap warga negaranya bebas untuk menganut

agama sesuai keinginan masing-masing individu. Kebebasan beragama inilah

yang menjadi salah satu faktor masuknya agama Islam di Prancis.

Agama Islam terus berkembang dengan pesat di Prancis. Hal ini ditandai

dengan meningkatnya jumlah penganut agama Islam di negara tersebut. Pada situs

berita *Pew Forum* edisi 27 Januari 2011, Prancis adalah salah satu negara dengan

jumlah penganut agama Islam terbesar di Eropa, yaitu mencapai empat juta orang.

Imigran Magribi memiliki peran yang besar dalam menyebarkan agama Islam di

Prancis. Mereka mendirikan organisasi-organisasi Islam yang menaungi kaum

muslim di Prancis. Dua di antara organisasi Islam tersebut adalah organisasi besar di Prancis, yaitu UOIF (*L'union des Organisations Islamiques de France*) dan FNMF (*Fédération Nationale de la Mutualité Française*).

Pabottinggi dan kawan-kawan (2008, hal. 55) dalam bukunya *Potret*

Politik Kaum Muslim di Prancis dan Kanada menjelaskan bahwa pada September

2004, Presiden Prancis, Jacques Chirac, mengusulkan Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang berisi tentang pelarangan penggunaan identitas agama di

Prancis. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut kemudian disetujui oleh

Majelis Tinggi (Senat) dan mulai diberlakukan pada September 2004. Undang-

Undang tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Isi

dari Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 adalah larangan penggunaan kerudung

(jilbab) bagi kaum wanita muslim (muslimah), Kippa bagi kaum Yahudi, dan

tanda salib bagi kaum Nasrani di area publik, seperti sekolah dan pemerintahan.

Lahirnya Undang-Undang *Laïcité* menjadi masalah bagi kaum muslim, khususnya

kaum muslimah di Prancis yang pada umumnya adalah kaum imigran Magribi.

Hal tersebut dikarenakan undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran

agama Islam yang mewajibkan bagi setiap wanita muslim (muslimah) untuk

menutup auratnya. Kewajiban menutup aurat bagi muslimah terkandung dalam

kitab suci Al-Quran pada surat An-Nur ayat: 31 dan surat Al-Ahzab ayat: 59.

**وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ إِلَّا مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جِيُونِهِنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتِهِنَّ إِلَّا لِبَعْوَتِهِنَّ أَوْ
 فَأَبَاءَعَ بَعْوَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعْوَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَأَبْنَاءَ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ عَيْرَ أَوْلَى الْإِرْزَاقَةِ مِنْ
 جَالِ أَوْ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا يَعْمَلْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**
 (٣١)

“Dan Katakanlah kepada perempuan yang beriman: agar mereka menjaga

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan
 perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka
 menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan
 perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau
 ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau saudara-saudara laki-laki
 mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara
 perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba
 sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak
 mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum
 mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan
 kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah
 kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu
 beruntung”.

Penjelasan mengenai kewajiban menutup aurat bagi muslimah pada surat

Al-Ahzab ayat: 59 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرَفُنَّ فَلَا يُؤْذِنُ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا رَحِيمًا (٥٩)

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 seolah membatasi ruang gerak kaum wanita muslim (muslimah) di Prancis. Mereka tidak boleh mengenakan jilbab di area publik, seperti sekolah dan pemerintahan. Mereka diwajibkan melepas jilbab mereka jika akan masuk ke sekolah ataupun gedung-gedung pemerintahan. Akhirnya, kebebasan beragama di Prancis dipertanyakan.

Negara memberikan kebebasan beragama, tetapi kemudian negara mengeluarkan Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu bagaimanakah wanita-wanita muslim imigran Magribi menunjukkan jilbab sebagai identitas agama Islam sedangkan penggunaan jilbab dilarang oleh pemerintah Prancis, terutama posisi wanita-wanita muslim yang menempuh pendidikan di sekolah publik Prancis. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dan akan dikaji oleh penulis dengan menggunakan dua teori yaitu teori deskriptif kausalitas (2008) dan teori multikausalitas (2008) oleh Kuntowijoyo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis?
2. Bagaimanakah wanita-wanita muslim imigran Magribi menunjukkan indentitas agama Islam dalam kiprah mereka di dunia pendidikan Prancis pada era pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995 – 2007)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah wanita-wanita muslim imigran Magribi menunjukkan indentitas agama Islam dalam kiprah mereka di dunia pendidikan Prancis pada era pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995 – 2007).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Sebagai manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sebagai manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan

mengenai hubungan antara Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 dan kebebasan

beragama bagi kaum wanita muslim Magribi di Prancis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek ruang, aspek

waktu, dan aspek tematis. Aspek ruang dalam penelitian ini adalah Prancis. Aspek

waktu dalam penelitian ini adalah pada era pemerintahan Presiden Jacques Chirac

(1995 – 2007). Aspek tematis dalam penelitian ini adalah hubungan antara

Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 dan kebebasan beragama bagi kaum wanita

muslim imigran magribi pada era pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995 –

2007) di Prancis.

1.6 Definisi Istilah Kunci

Imigran : Orang-orang asing yang masuk ke dalam suatu negara untuk

tinggal dan menetap di negara tersebut (Suharso, 2014, hal. 178).

Magribi : Negara-negara Islam yang berada di wilayah Afrika Utara

(Suharso, 2014, hal. 303).

Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 : Undang-Undang di Prancis yang

berisi mengenai larangan penggunaan identitas agama di lingkungan

sekolah (Pabotinggi, 2008, hal. 55).

Jilbab : Kain yang digunakan oleh wanita-wanita muslim untuk menutup

aurat mereka (Ibrahim, 2009, hal. 5).



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.1 Teori Multikausalitas

Terdapat perbedaan mengenai teori deskriptif kausalitas dan teori multikausalitas. Kuntowijoyo (2008, hal. 42) menjelaskan bahwa “perbedaannya terletak dalam analisis kausalitas. Dalam analisis multikausalitas, sejawan melihat kasus itu dari beberapa segi, prosesual dan struktural, kausalitas yang kompleks”. Kuntowijoyo (2008) menyebutkan pada buku *The Peasants' Revolt of Banten in 1888* oleh Sartono Kartodirdjo, Sartono melakukan analisis multikausalitas dalam berbagai aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan teori multikausalitas oleh Kuntowijoyo, dapat disimpulkan bahwa teori multikausalitas menganalisis sebab akibat dari suatu peristiwa sejarah yang ditinjau dari beberapa aspek, sebagai contoh aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Teori multikausalitas oleh Kuntowijoyo digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis.

Penulis akan meneliti tiga faktor, yaitu faktor sosial, sejarah, dan politik.

2.2 Teori Deskriptif Kausalitas

Kuntowijoyo (2008, hal. 36) menjelaskan bahwa “time-sequence adalah deskripsi dalam sejarah, sedangkan plot adalah deskripsi-kausalitas. Deskripsi + kausalitas sejarah itu terdiri dari *condition*, *sequence*, dan *consequence*”. Kuntowijoyo (2008, hal. 36) menambahkan lagi jika “dalam kausalitas, sejarawan harus menganalisis dua hal, yaitu kasus (peristiwa) dan perubahan. Kedua berbeda dalam akibat (*consequence*) yang ditimbulkan: kasus bersifat prosesual tanpa perubahan, sedangkan dalam perubahan terjadi kausalitas, yaitu perubahan structural (*structural change*) dan perubahan sistem (*systemic change*)”.

Berdasarkan teori deskriptif kausalitas oleh Kuntowijoyo, dapat disimpulkan bahwa teori deskriptif kausalitas menganalisis latar belakang dari suatu peristiwa sejarah dan akibat apa saja yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Teori deskriptif kausalitas oleh Kuntowijoyo digunakan untuk menjawab rumusan masalah ke dua dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah wanita-wanita muslim imigran Magribi menunjukkan jilbab sebagai identitas agama Islam

dalam kiprah mereka di dunia pendidikan Prancis pada era pemerintahan Presiden

Jacques Chirac (1995 – 2007).

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua penelitian

terdahulu sebagai referensi. Penelitian pertama adalah *Undang-undang Laïcité*

2004 (*Sebuah Analisis Terhadap disahkannya Undang-undang Pelarangan*

Pemakaian Simbol-simbol Keagamaan di Sekolah Negeri di Prancis) oleh Roosi

Rusmawati (2006). Penelitian tersebut mengkaji mengenai latar belakang lahirnya

undang-undang *Laïcité* di Prancis serta manfaat dan dampak apa sajakah yang

ditimbulkan. Pada penelitian tersebut, Roosi Rusmawati menggunakan dua

landasan teori, yaitu teori Kepentingan Nasional dan Teori Adaptasi Lintas

Budaya.

Penelitian ke dua adalah *Posisi Imigran Maghribi dalam Peristiwa Mei*

1968 di Prancis dan Imigran Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998 di Indonesia

serta Dampak yang Ditimbulkannya oleh Meliana, mahasiswa Bahasa dan Sastra

Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya (2014). Penelitian tersebut

mengenai perbandingkan posisi imigran Magribi dalam peristiwa Mei 1968 di

Prancis dan imigran Tionghoa dalam peristiwa Mei 1998 di Indonesia. Meliana

menyimpulkan jika imigran Magribi dan Imigran Tionghoa memiliki posisi yang

berbeda. Pada peristiwa Mei 1968 di Prancis, imigran Magribi dan masyarakat

lokal Prancis bersatu untuk mengkritik pemerintahan di Prancis. Sementara itu

dalam peristiwa Mei 1998 di Indonesia, imigran Tionghoa merupakan korban dari tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat lokal Indonesia. Pada penelitian tersebut, Meliana menggunakan teori paralelisme horizontal sebagai landasan teori. Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut adalah objek yang diteliti, yaitu imigran Magribi di Prancis dan Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Akan tetapi penelitian ini menawarkan sesuatu yang baru. Pada penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimanakah wanita muslim imigran Magribi menunjukkan identitas agama Islam dalam kiprah mereka di dunia pendidikan Prancis pada era pemerintahan Jacques Chirac (1995 – 2007), sedangkan pemakaian jilbab itu sendiri dilarang di sekolah-sekolah publik Prancis karena adanya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 dan penulis akan meneliti mengenai faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang *Laïcité* Tahun 2004 (faktor sosial, sejarah, dan politik).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, khususnya mengenai jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian kausal komparatif. Nazir (dikutip dari Prastowo, 2011, hal. 201) menjelaskan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang”. Sementara itu, Indriantoro dan Supomo (2009, hal. 26) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Penelitian deskriptif menurut Raco (2010, hal. 60) adalah “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengandalkan data berupa teks”.

Kemudian Raco menjelaskan (2010, hal. 4) mengenai penelitian kualitatif yaitu “metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendalami tentang suatu gejala, fakta, atau realita”.

Berdasarkan keempat pengertian mengenai penelitian deskriptif dan

penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif

adalah metode penelitian yang menggunakan teks sebagai data untuk meneliti

suatu objek, kondisi, ataupun suatu pemikiran dengan mendalami

realita yang terjadi.

Selanjutnya Nazir (dikutip dari Prastowo, 2011, hal. 210) menjelaskan

bahwa “penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin

mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-

faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu”. Sementara itu,

pengertian kausal komparatif menurut Indriantoro dan Supomo (2009, hal. 27)

adalah “penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) merupakan

tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara

dua variabel atau lebih”.

Berdasarkan kedua pengertian mengenai penelitian kausal komparatif,

dapat disimpulkan bahwa penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian

deskriptif yang mengkaji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih

dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu peristiwa tertentu.

3.2 Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data utama dan

data pendukung.

Data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

tertulis yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, kitab suci Al-Quran, koran, laman internet, arsip, dan dokumen-dokumen pendukung mengenai imigran Magribi,

Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004, sejarah agama Islam di Eropa, khususnya di

Prancis dan dunia pendidikan Prancis.

Data pendukung yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

tertulis yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, koran, laman internet, arsip, dan dokumen-dokumen pendukung mengenai sejarah Prancis dan pemerintahan

Presiden Jacques Chirac (1995 – 2007) di Prancis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan

menggunakan cara-cara yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya yaitu

Metode Penelitian Bisnis. Meskipun buku tersebut berisi penjelasan mengenai metode penelitian di bidang ekonomi dan bisnis, tetapi menurut pemahaman

penulis, penjelasan Sugiyono bersifat *universal* dan dapat diterapkan di bidang

ilmu sosial yang lain, termasuk sejarah. Sugiyono (2010, hal.402) menjelaskan

bawa terdapat empat teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan trianggulasi (gabungan).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Sugiyono (2010, hal. 422) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk dokumen, yaitu dokumen tertulis, dokumen gambar dan dokumen karya.

Dokumen tertulis dapat berupa cerita, biografi, catatan harian, tabel, dokumen sejarah, peraturan-peraturan , kebijakan, atau kitab suci. Dokumen gambar dapat berupa foto, gambar hidup, atau sketsa. Sementara itu, dokumen karya dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah mencari sumber dokumen tertulis, dokumen gambar atau dokumen karya yang berupa buku-buku, artikel ilmiah, kitab suci Al-Quran, koran, situs internet, arsip, film dokumenter dan dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi referensi pada penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dikutip (dikutip dari Sugiyono, 2010, hal. 430) menjelaskan bahwa proses dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan. Aktivitas-aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hal.

(430) adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan

penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Analisis data yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan

pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap ini penulis akan mengklasifikasi data-data yang

berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan memilih data-data

yang perlu digunakan dan yang tidak perlu digunakan dengan

memberikan tanda pada masing-masing data tersebut. Data-data

yang perlu digunakan akan diberi tanda biru. Sementara itu, data-

data yang tidak perlu digunakan akan diberi tanda merah.

Selanjutnya penulis akan memfokuskan pada data-data yang

penting dan pokok sesuai dengan tema penelitian ini. Hal ini

dilakukan agar penulis dengan mudah mendapatkan informasi dan

gambaran sesuai dengan tema penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Pada tahap ini penulis akan menganalisis dan mengolah data-data

yang telah diklasifikasikan. Kemudian, data-data yang telah

dianalisis dan diolah tersebut akan disajikan dalam bentuk teks

narratif. Penulis menggunakan pendapat dari Miles dan Huberman

dalam penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hal.

434) mengemukakan bahwa “*the most frequent from display data*

for qualitative research data in the past has been narrative text”.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hal. 434), penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahai ini, penulis akan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang telah selesai dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks naratif.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis dan temuan penelitian yang dilakukan oleh

penulis. Pembahasan pada bab ini meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi

lahirnya Undang-Undang Laïcité tahun 2004 di Prancis dan cara muslimah

Magribi menunjukkan identitas agama Islam dalam dunia pendidikan di Prancis.

4.1 Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Lahirnya Undang-Undang Laïcité

Tahun 2004 di Prancis

Konsep *laïcité* bukanlah sesuatu yang baru di Prancis. Kata *laïcité*

memiliki arti sekulerisme. Kata *laïcité* sendiri merupakan bentuk kata benda,

sedangkan bentuk kata sifat dari *laïcité* adalah “*laïque*”.¹ Selanjutnya Paryatun

dalam Kamus Besar Bahasa Prancis (2013, hal. 176) menjelaskan bahwa

pengertian dari kata *laïque* adalah sekuler. Di Prancis, konsep dari *laïcité* adalah

pemisahan antara hubungan negara dengan agama yang didasarkan pada tiga

prinsip. Ketiga prinsip tersebut adalah kebebasan hati nurani serta kebebasan

beribadah, pemisahan antara lembaga publik dengan organisasi agama, dan

persamaan di hadapan hukum bagi semua masyarakat tanpa memandang kepercayaan dan keyakinan mereka.²

Sebelum lahirnya dan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004,

Prancis mengalami sejarah yang panjang dalam pembentukan negara sekuler.

Pembentukan negara sekuler salah satunya dilatarbelakangi oleh perang agama di

Prancis, yang kemudian menjadi faktor sejarah dari lahirnya Undang-Undang

Laïcité Tahun 2004 di Prancis. Sementara itu, selain faktor sejarah, lahirnya

Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis juga dilatarbelakangi oleh faktor

sosial dan faktor politik.

4.1.1 Faktor Sejarah

Peristiwa-peristiwa sejarah menjadi salah satu latar belakang pembentukan

Prancis sebagai negara sekuler hingga lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun

2004 di Prancis. Presiden Jacques Chirac melalui pidatonya pada tanggal 17

Desember 2003, menjelaskan jika negara Prancis harus melalui perjalanan

panjang hingga akhirnya menetapkan Prancis sebagai negara sekuler.³ Perang

agama yang terjadi di Prancis menjadi faktor sejarah yang melatarbelakangi

pembentukan Prancis sebagai negara sekuler hingga lahirnya Undang-Undang

Laïcité Tahun 2004.

Pada tahun 1562, terjadi konflik antara agama Katolik dan Protestan di

Prancis. Tercatat telah terjadi delapan kali perang agama yang berlangsung dari

tahun 1562 hingga 1598 di Prancis.⁴ Pada kala itu, kehadiran agama Protestan tidak diterima oleh umat Katolik di Prancis. Penolakan atas agama Protestan menimbulkan konflik dan perpecahan antara umat Katolik dan Protestan. Konflik yang terjadi kemudian berlanjut menjadi perang agama antara umat Katolik dan Protestan setelah terjadinya peristiwa pembantaian di Vassy tahun 1562.⁵ Umat Protestan yang pada saat itu tengah beribadah menjadi korban atas pembantaian yang dilakukan oleh Duke François de Guise. Pembantaian di Vassy menyebabkan umat Protestan melakukan pemberontakan-pemberontakan yang kemudian menewaskan Duke François de Guise.⁶

Perang agama Katolik dengan Protestan yang berlangsung hingga lebih dari tiga puluh tahun, berakhir pada tahun 1598. Berakhirnya perang agama ditandai dengan lahirnya perjanjian perdamaian yang dikenal dengan *L'edit de nantes*. *L'edit de nantes* ditanda tangani oleh Henri IV pada bulan April 1598.⁷

Perang agama yang terjadi selama kurun waktu lebih dari tiga puluh tahun tersebut memberikan dampak yang besar terhadap Prancis. Perang yang dilatarberlakangi oleh konflik antara agama Katolik dan Protestan menjadi saksi sejarah akan pentingnya toleransi beragama di sebuah negara. Vianney Sevaistre, seorang kepala kantor pusat organisasi agama di Prancis mengemukakan pendapatnya mengenai *laïcité* di Prancis. Selama wawancara, Vianney Sevaistre cenderung memberikan pandangannya mengenai posisi agama-agama di Prancis.

Ia menjelaskan jika perang agama yang terjadi di Prancis hingga pertentangan antara gereja Katolik dan sekularis telah menjadi bagian dari sejarah Prancis.

Menurut Sevaistre, pembatasan dari kebebasan beribadah dilakukan demi menghindari terjadinya perang agama kembali di Prancis.⁸



4.1.2 Faktor Sosial

Beragam agama hidup di Prancis, salah satunya adalah agama Islam.

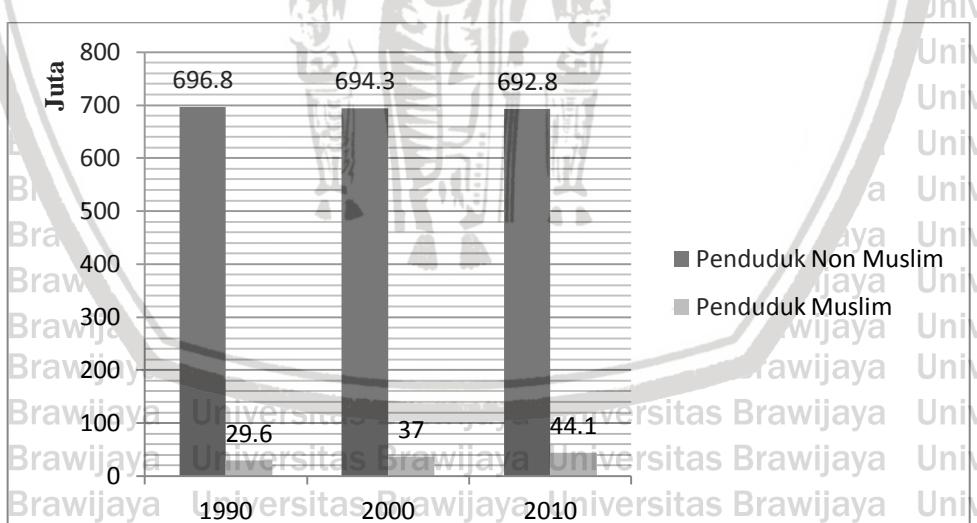
Masuknya agama Islam ke Prancis melalui proses yang cukup panjang. Interaksi umat Islam dengan dunia barat sudah dimulai dari peristiwa Perang Salib. Perang tersebut dikenal dengan nama perang salib dikarenakan ketika perang tersebut terjadi, tentara-tentara Kristen memakai tanda salib. Tanda salib digunakan sebagai bentuk pemersatu tentara-tentara Kristen.⁹

Perebutan wilayah Palestina menjadi latar belakang terjadinya Perang Salib. Sementara itu, menurut Sulisman dan Suparman dalam buku mereka yang berjudul *Sejarah Islam di Asia dan Eropa* (2013, hal. 205) terdapat empat faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Salib. Empat faktor tersebut adalah faktor sejarah, faktor agama, faktor politik dan faktor sosial ekonomi. Selanjutnya Sulisman dan Suparman (2013, hal. 209) menjelaskan bahwa Perang Salib pertama kali terjadi di Clermont pada tanggal 26 November 1095. Perang Salib yang terjadi selama kurang lebih dua abad berakhir pada tahun 1271.¹⁰

Agama Islam pertama kali masuk ke benua Eropa pada 711 M, yaitu di negara Spanyol, pada tepatnya di kota Cordova.¹¹ Hingga pada awal abad ke-8 M, bangsa Islam telah melebarkan wilayah kekuasaannya ke seluruh negara Spanyol, Prancis Tengah dan beberapa bagian di Italia.¹² Secara perlahan agama Islam mulai memasuki sebagian besar negara-negara di wilayah Eropa, salah satunya adalah negara Prancis. Akan tetapi kejayaan Islam di Eropa mengalami kemunduran dan kehancuran. Sulisman dan Suparman (2008, hal. 259)

menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya kejayaan Islam di Eropa dikarenakan adanya konflik antara umat Islam dengan umat Kristen. Masuknya dan berkembangnya agama Islam di Eropa memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap rasa kebangsaan bagi masyarakat di Spanyol yang beragama Kristen. Pada akhirnya umat Kristen bersatu melakukan perlawanan terhadap bangsa Islam di Eropa untuk merebut kembali wilayah-wilayah mereka. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama *Reconquista*.¹³

Meskipun kejayaan Islam di Eropa sempat mengalami keruntuhan, perlahan agama Islam mulai masuk kembali ke benua Eropa. Melalui analisis data statistik yang dilakukan oleh *Pew Forum Research*, dijabarkan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penganut agama Islam selama kurun waktu tiga puluh tahun.¹⁴ Lihat gambar 4.1.2.1



Gambar 4.1.2.1. Peningkatan Populasi Umat Islam di Eropa (diadaptasi dari <http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/>)

Berdasarkan data statistik pada gambar 4.1.2.1 terlihat jumlah penganut agama Islam di benua Eropa terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tiga puluh tahun, yaitu dari tahun 1990 hingga 2010. Pada tahun 1990, sekitar 4,1% penduduk eropa beragama Islam. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 5,1% pada tahun 2000, yaitu mencapai 37.000.000 penganut dari 694.300.000 penduduk Eropa. Pada tahun 2010, penganut agama Islam di Eropa mencapai angka 44.100.000, yaitu 6% dari jumlah penduduk total Eropa.

Di negara Prancis itu sendiri, agama Islam juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan situs berita *Pew Forum Research* edisi 27 Januari 2011, dijelaskan bahwa pada tahun 2010, negara Prancis menjadi salah satu negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di Eropa, yaitu mencapai lebih dari empat juta pemeluk. Lihat tabel 4.1.2.2

Negara	Estimasi Penduduk Muslim tahun 2010	Estimasi Persentase Penduduk Muslim tahun 2010
Austria	475.000	5.7 %
Belgia	638.000	6.0 %
Denmark	226.000	4.1 %
Finlandia	42.000	0.8 %
Prancis	4.704.000	7.5 %
Jerman	4.119.000	5.0 %
Yunani	527.000	4.7 %
Irlandia	43.000	0.9 %
Italia	1.583.000	2.6 %
Luxembourg	11.000	2.3 %
Belanda	914.000	5.5 %
Norwegia	144.000	3.0 %
Portugal	65.000	0.6 %
Spaniol	1.021.000	2.3 %
Swedia	451.000	4.9 %
Swiss	433.000	5.7 %
Inggris	2.869.000	4.6 %
Total	18.267.000	4.5 %

Tabel 4.1.2.2 Jumlah Populasi Umat Islam di Beberapa Negara Eropa (diadaptasi dari <http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/>)

Berdasarkan data pada tabel 4.1.2.2 terlihat bahwa pada tahun 2010, 7,5%

umat Islam di benua Eropa adalah warga negara Prancis. Pada tahun 2010, jumlah

penganut agama Islam di Prancis mencapai angka 4.704.000 pemeluk. Jumlah

tersebut terhitung cukup besar jika dilihat bahwa negara Prancis bukanlah negara

dengan penduduk mayoritas Islam.

Selain penaklukan wilayah-wilayah di Eropa yang dilakukan oleh prajurit-

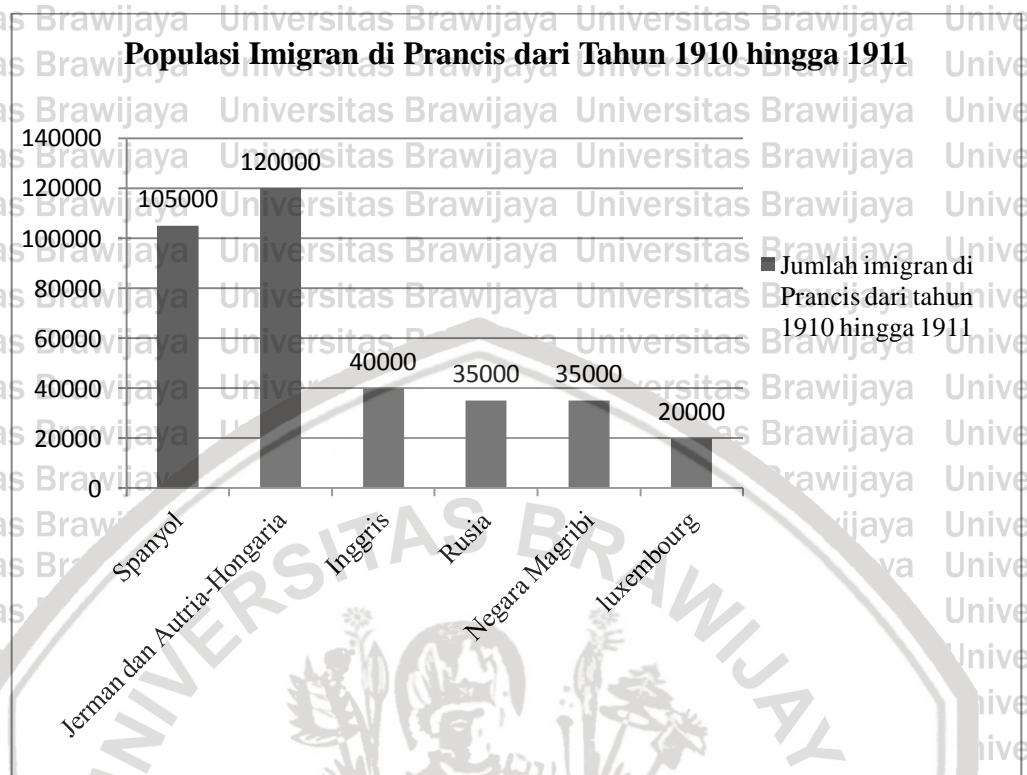
prajurit Islam, para imigran Magribi juga turut berperan dalam proses masuk dan

berkembangnya agama Islam di Prancis. Para imigran Magribi yang mayoritas

beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya pengaruh

agama Islam di negara tersebut. Gelombang migrasi pertama di Prancis mulai terjadi sebelum era perang dunia kedua, yaitu sekitar tahun 1800. Pada tahun 1830, industri di negara Prancis mengalami perkembangan. Salah satu hal yang menandai perkembangan industri di negara Prancis adalah meningkatnya jumlah produksi baja serta pembangkit listrik tenaga air. Pertumbuhan industri yang terjadi di negara Prancis mendorong terjadinya peningkatan akan permintaan tenaga kerja. Akan tetapi, permintaan tenaga kerja yang besar tidak sesuai dengan jumlah tenaga yang tersedia di Prancis pada saat itu. Angka kelahiran yang rendah menjadi pemicu kurang tersedianya tenaga-tenaga kerja.¹⁵

Tingginya angka permintaan tenaga kerja serta kondisi ekonomi Prancis yang membaik, mendorong para imigran untuk datang dan bekerja sebagai buruh di negara Prancis. Para imigran yang bekerja di Prancis berasal dari berbagai negara, yaitu seperti Itali, Spanyol, Belgia dan negara-negara Magribi (Maroko, Tunisia dan Aljazair). Pada tahun 1911, tercatat jumlah imigran Magribi di Prancis mencapai angka 35.000 jiwa.¹⁶ Lihat gambar 4.1.2.3



Gambar 4.1.2.3 Populasi imigran di Prancis dari tahun 1910 hingga 1911 (Diadaptasi dari http://www.preavis.org/formation-mr/Lutins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf)

Gelombang migrasi kedua di Prancis terjadi setelah Perang Dunia Ke Dua.

Setelah terjadinya Perang Dunia Ke Dua, populasi imigran Magribi di negara

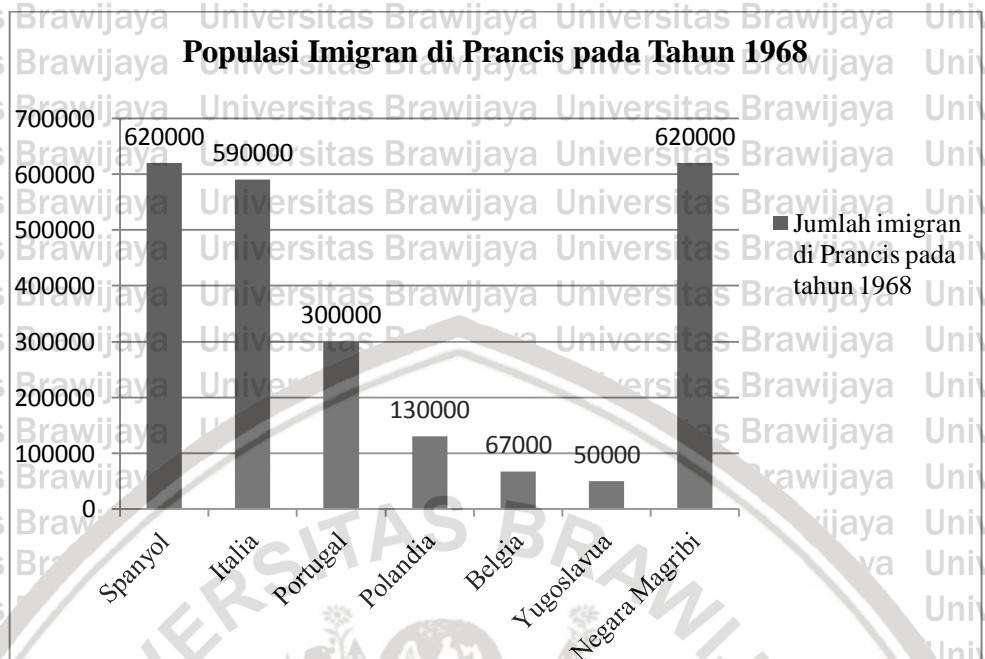
Prancis semakin meningkat. Tercatat pada tahun 1945, dari 1.8 juta imigran di

Prancis, 210.000 dari imigran tersebut berasal dari Aljazair. Jumlah tersebut kian

meningkat setelah adanya perjanjian antara *L'ONI* (*L'Office National*

d'Immigration) dengan beberapa negara, salah satunya adalah negara-negara

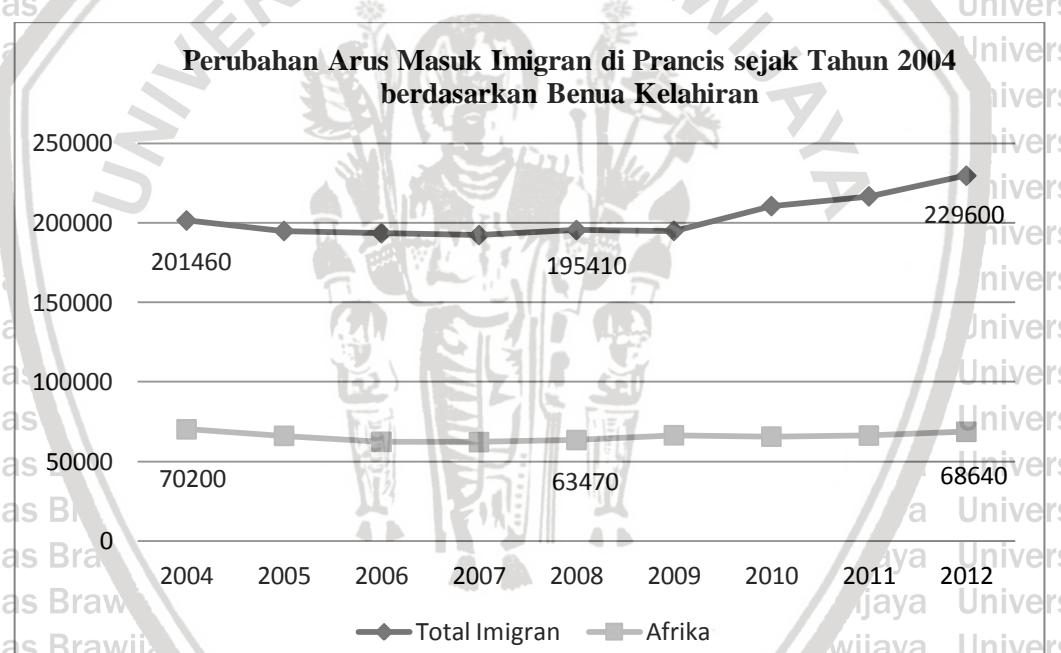
Magribi.¹⁷



Gambar 4.1.2.4 Populasi imigran di Prancis pada tahun 1968 (diadaptasi dari http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf)

Berdasarkan data pada gambar 4.1.2.4, pada tahun 1968, populasi imigran dari negara-negara Magribi menjadi salah satu yang terbesar di Prancis. Pada tahun 1968, jumlah imigran Magribi yang tinggal di Prancis mencapai angka 620.000 jiwa. Akan tetapi pada tahun 1974, sempat terjadi penurunan jumlah imigran di Prancis dikarenakan dihentikannya permintaan tenaga kerja asing oleh pemerintah Prancis. Krisis ekonomi yang dialami oleh negara Prancis menjadi pemicu dihentikannya gelombang migrasi di negara tersebut. Efek yang terjadi dari pemberhentian tersebut adalah kembalinya para imigran ke negara asal mereka. Akan tetapi, tidak sedikit pula imigran yang menetap di Prancis dan kemudian turut serta mengundang keluarga mereka untuk datang dan tinggal di Prancis.¹⁸

Selepas krisis ekonomi yang dialami negara Prancis, gelombang migrasi di negara tersebut kemudian terus meningkat hingga saat ini. Berdasarkan data yang dihimpun L'INSEE (*L'Institut national de la statistique et des études économiques*), dari tahun 2004 hingga 2012, sebanyak 200.000 imigran datang ke Prancis setiap tahunnya. Para imigran tersebut berasal dari berbagai benua, yaitu benua Eropa, Asia, Afrika hingga Amerika dan Oseania. Sementara itu, jumlah arus masuk imigran dari benua Afrika di Prancis mencapai lebih dari 60.000 jiwa setiap tahunnya.¹⁹ Lihat gambar 4.1.2.5



Gambar 4.1.2.5 Perubahan Arus Masuk Imigran di Prancis sejak Tahun 2004 berdasarkan Benua Kelahiran (diadaptasi dari http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524)

Berdasarkan data pada gambar 4.1.2.5 terjadi peningkatan jumlah arus

masuk imigran di negara Prancis. Dibandingkan pada tahun 2004, imigran dari benua Afrika mengalami penurunan jumlah arus masuk sebanyak 6730 orang

pada tahun 2008. Akan tetapi, sejak tahun 2010 hingga 2012, jumlah arus masuk imigran dari benua Afrika mengalami peningkatan sebanyak 3030 orang. Pada

tahun 2012, jumlah arus masuk imigran Afrika di Prancis mencapai angka 68.640

jiwa.

Meningkatnya pengikut agama Islam yang sebagian besar merupakan

imigran Magribi maupun keturunannya semakin menambah keanekaragaman di

Prancis. Dalam rangka menciptakan perdamaian antar agama di Prancis, toleransi

antar umat beragama sangat diperlukan. Selain itu, adanya toleransi antar umat

beragama dapat menghindari terjadinya diskriminasi-diskriminasi agama di

Prancis. Oleh sebab itu, Presiden Jacques Chirac dalam pidatonya pada tanggal 17

Desember 2003 menjelaskan akan pentingnya mempertahankan konsep *laïcité* di

Prancis, terutama di sekolah-sekolah publik. Selanjutnya Jacques Chirac

menjelaskan jika perjuangan Prancis demi terciptanya perdamaian, keadilan, dan

hak manusia dapat terlihat dari bendera, bahasa, dan sejarah Prancis yang

semuanya menjelaskan mengenai nilai-nilai toleransi untuk menghormati

keanekaragaman yang ada di Prancis. *Laïcité* memberikan kebebasan bagi setiap

orang untuk beribadah secara damai tanpa adanya paksaan untuk meyakini suatu

agama, oleh karena itu Jacques Chirac mengatakan jika *laïcité* adalah elemen

penting dari perdamaian sosial.²⁰

Selain Presiden Jacques Chirac, Blandine Kriegel, yang merupakan filosof

politik di Prancis turut menjelaskan pandangannya mengenai penerapan *laïcité*

dan muslim di Prancis. Kriegel mengatakan bahwa Prancis memegang tegas

prinsip *laïcité*. Ia kemudian menjelaskan mengenai tradisi kebebasan beragama di

Prancis yang menjamin adanya netralitas agama di area publik. Seperti sekolah

yang merupakan area publik dimana masyarakat umum menuntut ilmu disana.²¹

Diterapkannya prinsip *laïcité* di sekolah publik secara tidak langsung

menggambarkan mengenai pentingnya netralitas agama di sekolah. Sekolah

merupakan ruang publik dimana sebagian besar masyarakat umum belajar disana.

Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 diharapkan dapat

memberikan pengertian bagi setiap kalangan akademisi, terutama para pelajar,

akan pentingnya sikap saling menghargai antar umat beragama.



4.1.3 Faktor Politik

Sebelum lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis, penegasan mengenai pemisahan hubungan antara agama dengan pemerintahan telah terlebih dahulu dijelaskan dalam Konstitusi 9 Desember 1905. Di dalam Konstitusi 9 Desember 1905 secara tegas dijelaskan adanya pagar pemisah antara negara dengan gereja. Pasal satu dalam Konstitusi 9 Desember 1905 menjelaskan bahwa negara Prancis menjamin kebebasan beribadah bagi setiap warganya di Prancis. Selanjutnya, pada pasal dua dijelaskan bahwa dimulai sejak tanggal 1 Januari, negara Prancis tidak akan lagi mendanai segala kegiatan-kegiatan keagamaan. Pendanaan segala kegiatan keagamaan akan dihapuskan dari anggaran negara.²²

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip negara sekuler yang dianut Prancis kemudian dijelaskan dalam Konstitusi 4 Oktober 1958. Di dalam Konstitusi 4 Oktober 1958, Prancis kembali secara tegas menjelaskan bahwa Prancis merupakan negara sekuler. Penjelasan mengenai Prancis sebagai negara sekuler terkandung pada pasal satu Konstitusi 4 Oktober 1958 pasal 1.²³ Lahir dan diterapkannya Konstitusi 9 Desember 1905 hingga penetapan Konstitusi 4

Oktober 1958 secara jelas terlihat mengenai penegasan konsep negara sekuler yang dianut oleh Prancis.

Setelah lebih dari empat puluh tahun sejak ditetapkannya Konstitusi 4 Oktober 1905, Presiden Jacques Chirac, dalam pidatonya pada tanggal 17

Desember 2003, ingin mempertegas kembali mengenai prinsip-prinsip *Laïcité*

yang telah lama diterapkan di Prancis. Presiden Jacques Chirac mengatakan jika *laïcité* merupakan jantung dari identitas Prancis. Pada akhir pidatonya, Presiden Jacques Chirac menjelaskan akan pentingnya penerapan *laïcité* di sekolah publik.²⁴ Berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden Jacques Chirac pada tanggal 17 Desember 2003, secara umum dapat disimpulkan bahwa ia akan tetap mempertahankan prinsip sekulerisme di Prancis. Selanjutnya, seperti yang telah disampaikan Presiden Jacques Chirac dalam pidatonya 17 Desember 2003, ia ingin menegaskan kembali sekulerisme di sekolah publik.

Dalam rangka penegasan kembali konsep negara sekuler di Prancis, terutama di lingkungan sekolah publik, Presiden Jacques Chirac semasa jabatannya mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke Majelis Nasional yang kemudian diteruskan ke Senat Prancis. Rancangan Undang-Undang (RUU) berisi mengenai pelarangan penggunaan simbol-simbol atau identitas keagamaan di lingkungan sekolah publik.²⁵

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa terdapat faktor langsung dan faktor tidak langsung yang melatarbelakangi lahir dan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis. Faktor sosial dan faktor politik menjadi faktor yang secara langsung menyebabkan lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis, sedangkan faktor sejarah menjadi faktor tidak langsung.

4.2 Cara Muslimah Magribi Menunjukkan Identitas Agama Islam dalam Dunia Pendidikan di Prancis

Agama Islam merupakan salah satu agama dengan jumlah pengikut terbesar di Prancis. Para imigran Magribi yang mayoritas beragama Islam turut serta dalam membantu proses penyebaran agama Islam di Prancis hingga agama tersebut terus tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Akan tetapi, perkembangan dan kebebasan dalam beragama Islam di Prancis sedikit terganggu sejak lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004, Presiden Jacques Chirac terlebih dahulu mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mempertegas penerapan *laïcité* di sekolah publik. Proses pengadopsian Rancangan Undang-Undang (RUU) penerapan *laïcité* di sekolah publik hingga dapat menjadi sebuah sebuah undang-undang harus melalui rangkaian proses yang panjang. Pada tahap pertama, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut diajukan ke Majelis Nasional pada tanggal 28 Januari 2004. Setelah disetujui oleh Majelis Nasional, pada tanggal 11 Februari 2004, Rancangan Undang-Undang (RUU) diteruskan ke Senat Prancis untuk di bahas dalam rapat Senat. Pada tanggal 15 Maret 2004, Presiden Jacques Chirac secara resmi mengumumkan lahirnya Undang-Undang *Laïcité* 15 Maret 2004.²⁶ Pada pasal 1 dalam Undang-Undang *Laïcité* 15 Maret 2004 dijelaskan mengenai pelarangan penggunaan simbol-simbol keagamaan secara terang-terangan bagi murid-murid di sekolah-sekolah publik (TK, SMP, dan SMA). Selanjutnya, ketentuan mengenai waktu

berlakunya Undang-Undang *Laïcité* 15 Maret 2004 dijelaskan pada pasal tiga,

yaitu mulai diterapkan pada tahun ajaran berikutnya setelah diumumkannya

Undang-Undang tersebut.²⁷

Diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di lingkungan sekolah

tentu memberikan dampak yang besar terhadap umat Islam, khususnya wanita

muslim yang sebagian besar merupakan keturunan imigran Magribi. Kebebasan

beragama mereka menjadi terganggu sejak diterapkannya undang-undang

tersebut. Mereka, kaum wanita muslim, dilarang untuk mengenakan simbol-

simbol keagamaan selama berada di lingkungan sekolah publik.

Lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 menimbulkan berbagai

macam reaksi publik, baik itu dari masyarakat Prancis sendiri maupun masyarakat

dunia. Di negara Prancis, gelombang protes dari umat muslim atas diterapkannya

undang-undang tersebut sangat besar. Pada tanggal 17 Januari 2004, sekitar

20.000 orang melakukan demo di Prancis. Beberapa dari pendemo tersebut

berkata bahwa Prancis adalah tanah air mereka dan Hijab adalah hidup mereka.²⁸

Selain di negara Prancis, salah satu negara yang melakukan protes adalah

negara Indonesia. Hampir seribu orang melakukan demo instansi di depan Konsul

Kebudayaan Prancis di Surabaya. 800 orang diantaranya adalah perempuan-

perempuan yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mereka

mengelakukan aksi demo sebagai bentuk protes atas diterapkannya Undang-Undang

pelarangan pemakaian jilbab di lingkungan sekolah maupun instansi publik di

negara Prancis. Mereka menentang kebijakan dari Presiden Jacques Chirac dan

menuntut agar kebijakan tersebut dibatalkan.²⁹

Walaupun sebagian besar masyarakat Prancis menolak lahirnya Undang-

Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis, tidak sedikit pula yang mendukung

diterapkannya undang-undang tersebut. Salah satu tokoh yang mendukung adalah

Gilles Garachon, yang merupakan Konsul Kebudayaan Prancis di Jakarta. Ia

menjelaskan bahwa diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 sebagai

wujud untuk mendukung toleransi beragama demi menghindari diskriminasi-

diskriminasi beragama di Prancis.³⁰

Setelah diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004, tidak sedikit

pelajar muslim yang mendapat masalah selama menempuh pendidikan mereka di

sekolah publik. Di satu sisi, mereka harus mematuhi peraturan mengenai

pelarangan simbol-simbol keagamaan di sekolah, akan tetapi di sisi lain,

sebagian besar dari mereka enggan untuk menanggalkan jilbab mereka. Hingga

pada akhirnya beberapa pelajar-pelajar muslim menemukan berbagai cara dalam

menunjukkan identitas agama Islam mereka selama berada di lingkungan sekolah.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh para pelajar

muslim tersebut dalam mempertahankan identitas agama mereka beserta contoh

kasus yang terjadi di Prancis.

Pada kasus pertama, beberapa pelajar muslim menggunakan rambut palsu

selama di lingkungan sekolah. Pada tahun 2004, dua orang wanita muslim yang

merupakan pelajar di sekolah publik di Bischheim-Strasbourg memutuskan untuk

mematuhi Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Salah satu pelajar bernama Fatima, menceritakan jika ia telah lama mengenakan jilbab, yaitu ketika ia berusia sepuluh tahun. Fatima dan satu pelajar lainnya menemukan cara agar mereka tetap dapat sekolah tanpa harus menanggalkan jilbab mereka. Mereka mengenakan rambut palsu ketika berada di sekolah. Akan tetapi bukan berarti mereka menanggalkan jilbab. Mereka tetap mengenakan jilbab, kemudian menutupinya dengan rambut palsu agar jilbab mereka tidak menjadi masalah selama di sekolah.

Mereka melakukan itu karena mereka ingin tetap menutup aurat mereka tanpa melanggar hukum.³¹

Berbeda dengan kedua pelajar muslim dari sekolah Bischheim-Strasbourg, pada kasus kedua, seorang pelajar muslim di sekolah Henri Wallon memilih cara lain. Pelajar tersebut bernama Nadia Arabi. Ia sering mengalami tindakan-tindakan diskriminasi karena mengenakan jilbab di sekolah. Nadia akhirnya memutuskan untuk menanggalkan jilbabnya karena ia tidak senang dan nyaman atas tindakan diskriminasi tersebut.³²

Dari sekian banyak kasus, tidak sedikit pula yang tetap mengenakan jilbab di sekolah. Terdapat salah satu contoh pada kasus tersebut. Mereka adalah dua orang saudara kembar, Samia dan Samira. Berbeda dengan ketiga pelajar muslim di sekolah Bischheim-Strasbourg dan Henri Wallon, kedua pelajar ini secara tegas menjelaskan bahwa mereka akan tetap mengenakan jilbab mereka selama di sekolah, meskipun hal tersebut secara jelas merupakan pelanggaran atas diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa jilbab merupakan sebuah keyakinan beragama.³³

Berdasarkan ketiga kasus yang terjadi di sekolah-sekolah Prancis tersebut, secara jelas terlihat dampak besar atas diterapkannya pelarangan simbol-simbol keagamaan di sekolah. Ruang gerak pelajar-pelajar muslimah kian terbatasi. Pada akhirnya pelajar-pelajar muslimah yang tengah menempuh pendidikan di sekolah-sekolah publik Prancis menjadi korban. Mereka tidak leluasa mengenakan jilbab untuk menutup aurat mereka selama berada di lingkungan sekolah. Selain itu, perlakuan buruk yang beberapa pelajar muslimah alami, seperti pengolokan yang dilakukan oleh teman-teman mereka selama berada di sekolah menjadi salah satu bentuk diskriminasi agama. Selain bentuk pengolokan, pada tahun 2015, seorang pelajar muslimah dikeluarkan dari kelas karena mengenakan jilbab dan rok. Kasus yang sama juga terjadi di sebuah kota yang terletak di timur laut Charleville-Mezieres. Seorang guru mengusir pelajar muslimah karena menggunakan rok panjang yang dianggap sebagai tanda keagamaan. Pengusiran yang dilakukan oleh guru tersebut dibenarkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat yang mengatakan jika penggunaan pakaian tertentu dapat menjadi bagian dari bentuk provokasi agama.³⁴

Pada kasus yang berbeda, para siswa yang beragama Islam dan Yahudi turut mengalami tindakan diskriminasi selama di sekolah. Para siswa yang beragama Islam dan Yahudi diwajibkan memakai cakram berwarna merah di leher selama jam makan siang di kantin. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan bagi para wali murid dan tokoh masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain pihak sekolah mengatakan jika penggunaan cakram merah dilakukan untuk memberikan tanda

bagi siswa yang beragama Islam dan Yahudi agar tidak disajikan makanan-

makanan yang mengandung babi.³⁵

Keputusan untuk tetap mengenakan jilbab atau bahkan menanggalkan

jilbab menjadi pilihan yang tidak mudah bagi pelajar-pelajar muslimah di sekolah

publik Prancis. Kewajiban mereka dalam menutup aurat adalah salah satu bentuk

perintah agama Islam yang harus mereka laksanakan. Akan tetapi di sisi lain,

mereka yang tetap mengenakan jilbab di sekolah juga dihadapkan pada

pelanggaran hukum yang nantinya mungkin dapat berdampak bagi masa depan

mereka. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah dikeluarkannya mereka dari

sekolah. Seorang direktur dari sekolah menengah yang terletak pinggiran kota

Strasbourg menegaskan akan memulangkan siswi-siswi yang tetap mengenakan

jilbab di sekolah. Tindakan lebih tegas seperti dikeluarkan dari sekolah akan

dilakukan jika siswi-siswi tersebut tetap mengenakan jilbab di sekolah.³⁶

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Konsep *laïcité* bukanlah sesuatu yang baru di Prancis. Prancis mengalami sejarah yang panjang dalam pembentukan negara sekuler. Peristiwa-peristiwa sejarah, seperti perang agama di Prancis, turut melatarbelakangi pembentukan Prancis sebagai negara sekuler. Prancis mengalami perang agama antara umat Katolik dan umat Protestan yang dipicu oleh berbagai macam konflik, seperti tidak diterimanya agama Protestan oleh umat Katolik di Prancis hingga peristiwa pembantaian umat Protestan. Perang agama di Prancis terjadi lebih dari tiga puluh, yaitu dari tahun 1562 hingga 1598. Hingga pada tahun 1905, lahir Konstitusi 1905 yang secara tegas menjelaskan mengenai pemisahan gereja dan negara. Konsep Prancis sebagai negara sekuler selanjutnya dituangkan dalam Konstitusi 4 Oktober 1958. Kemudian, penegasan akan sekulerisme di Prancis diteruskan pada dunia pendidikan dengan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Undang-

undang yang lahir pada 15 Maret 2004 tersebut berisi mengenai pelarangan

penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah publik.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan

bahwa terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang

Laïcité Tahun 2004. Ketiga faktor tersebut yaitu faktor sejarah, faktor sosial dan

faktor politik. Perang agama antara umat Katolik dan Protestan yang terjadi

selama lebih dari tiga puluh tahun di Prancis menjadi faktor sejarah dilahirkannya

Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004. Jika dilihat dari faktor sosial, Undang-

Undang *Laïcité* Tahun 2004 diterapkan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi

demi menghindari terjadinya diskriminasi-diskriminasi di Prancis, khususnya di

sekolah-sekolah publik. Nilai-nilai toleransi yang diterapkan dapat menyebabkan

terjadinya integrasi antar agama di Prancis. Adanya integrasi agama tentunya

dapat menghindari terjadinya perang agama kembali di Prancis. Selanjutnya,

mempertahankan konsep Prancis sebagai negara sekuler menjadi faktor politik

lahirnya dan diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis.

Diterapkannya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di sekolah-sekolah

publik memiliki dampak yang cukup besar kepada kaum muslimah di Prancis.

Lahirnya undang-undang tersebut seolah membatasi ruang gerak bagi pelajar-

pelajar muslimah di area sekolah publik. Mereka yang selama ini mengenakan

jilbab dihadapkan akan peraturan mengenai pelarangan penggunaan simbol-

simbol keagamaan di sekolah-sekolah publik.

Berbagai macam cara dilakukan kaum wanita muslim yang mayoritas merupakan imigran maupun keturunan imigran Magribi dalam menunjukkan identitas mereka sebagai umat Islam. Berdasarkan data-data yang telah dianalisis, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat tiga cara yang dilakukan pelajar-pelajar muslim dalam menunjukkan identitas agama Islam mereka di dunia pendidikan Prancis. Pada kasus pertama, beberapa pelajar muslim tetap memakai jilbab mereka yang kemudian ditutupi dengan rambut palsu selama berada di lingkungan sekolah. Pada kasus ke dua, seorang pelajar muslim memutuskan untuk menanggalkan jilbabnya karena perlakuan buruk yang terus ia terima selama ia mengenakan jilbab di sekolah. Sementara itu pada kasus ke tiga, dua orang pelajar muslim tetap mengenakan jilbab mereka di lingkungan sekolah publik dengan alasan bahwa penggunaan jilbab merupakan sebuah bentuk keyakinan bergama Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 di Prancis serta cara-cara yang dilakukan para pelajar muslim dalam menunjukkan identitas agama mereka, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis mengenai adakah keterkaitan antara Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004 dengan peraturan pelarangan penggunaan cadar di Prancis serta dampak apa saja yang ditimbulkan bagi kaum wanita muslim di Prancis.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Chairul. (2014). Denyut Islam di Negeri Mode. Diakses pada tanggal 10 September 2015 dari <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islammancanegara/14/03/28/n35bqq-denyut-islam-di-negeri-mode>
- Al-Quran Online. Diakses pada tanggal 5 November 2015 dari <http://quran.com>
- Al-Quran Online. Diakses pada tanggal 5 November 2015 dari <http://www.surah.my/>
- Bowen, John R. (2010). *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press. Kindle Edition.
- Ibrahim, Farid L. (2005). *Perempuan dan Jilbab*. PT Mapan.
- Indriantoro, Nur., Supomo, Bambang (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (n.d.). *Immigré*. Diakses pada tanggal 4 Mei 2015 dari <http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/immigre.htm>
- L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (n.d.). *NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité*. Diakses pada tanggal 4 Mei 2015 dari http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=NAT1&millesime=2006&niveau=1&typgeo=FE&codgeo=1
- Le Monde (n.d.). *Les Discours de Jacques Chirac*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2007/05/15/les-discours-de-jacques-chirac_910136_3224_8.html

Legifrance (n.d.). *Code de l'éducation - Article L141-5-1*. Diakses pada tanggal 10 Juli 2015 dari

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524456&dateTexte=20160122&categorieLien=id#LEGIARTI000006524456>

Legifrance (n.d.). *Constitution du 4 octobre 1958*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958>

Legifrance (n.d.). *Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000508749>

Legifrance (n.d.). *LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*. Diakses pada tanggal 10 Juli 2015 dari <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id>

M, Reza. (2010). *Senat Prancis Setujui Larangan Cadar*. Diakses pada tanggal 16 Januari 2016 dari <http://dunia.tempo.co/read/news/2010/09/15/117278316/senat-prancis-setujui-larangan-cadar>

Meliana. (2014). Posisi Imigran Maghribi dalam Peristiwa Mei 1968 di Prancis dan Imigran Tionghoa dalam Peristiwa Mei 1998 di Indonesia serta Dampak yang Ditimbulkannya. *Skripsi*, tidak diterbitkan. Malang.

Pabotenggi, Mochtar., Basyar, H. Hamdan., Mashad, Dhurorudin., dkk. (2008) *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paryatun. (2013). *Kamus Besar Bahasa Prancis*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Prastowo, Andi. (2011). *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.



CATATAN

1. Normandy Vision : The concept of Laïcité in France. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari <http://www.normandyvision.org/article12030701.php>
2. Observatoire de la Laïcité. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari <http://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite>
3. Les discours de Jacques Chirac. *Le Monde*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2007/05/15/les-discours-de-jacques-chirac_910136_3224_8.html
4. War of Religion, French history. *Britannica*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.britannica.com/event/Wars-of-Religion>
5. The War of Religion Part I. *Le Poulet Gauche*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.lepg.org/wars.htm>
6. The Eight Wars of Religion (1562 – 1598). *Musée Virtuel du Protestantisme*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.museeprotestant.org/en/notice/the-eight-wars-of-religion-1562-1598/>
7. Edict of Nantes, French History. *Britannica*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.britannica.com/event/Edict-of-Nantes>
8. Bowen, John R. (2010) *Why the French Don't Like Headscarves: Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press. Kindle Edition. Hal. 16-17
9. Sulasman dan suparman. (2013) *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 201.
10. Sulasman dan suparman. (2013) *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 218.
11. Sulasman dan suparman. (2013) *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 243.

12. Sulasman dan suparman. (2013) *Sejarah Islam di Asia dan Eropa*. Pustaka Setia: Bandung. Hal. 244-245.

13. Reconquista. *Britannica*. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari www.britannica.com/event/Reconquista

14. The Future of Global Muslim Population. Region: Europe. *Pew Research Center*. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari <http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/>

15. Histoire de l'immigration en France. Hal 4. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf

16. Histoire de l'immigration en France. Hal 5-6. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf

17. Histoire de l'immigration en France. Hal 9. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari http://www.preavis.org/formation-mr/Luttins/brochure_immigration_1-0.a5.pdf

18. France. Diakses pada tanggal 26 Desember 2015 dari <http://focus-migration.hwwi.de/France.1231.0.html?&L=1>

19. L'INSEE (*L'Institut national de la statistique et des études économiques*). *Les immigrés récemment arrivés en France*. Diakses pada tanggal 27 Desember 2015 dari http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1524

20. Les discours de Jacques Chirac. *Le Monde*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2007/05/15/les-discours-de-jacques-chirac_910136_3224_8.html

21. Bowen, John R. (2010) *Why the French Don't Like Headscarves; Islam, the State, and Public Space*. Princeton University Press. Kindle Edition. Hal.

22. Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Legifrance. Diakses pada tanggal 22 Desember 2015 dari <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000000508749>

23. Constitution du 4 octobre 1958. *Legifrance*. Diakses pada tanggal 22

Desember 2015 dari <http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958>

24. Les discours de Jacques Chirac. *Le Monde*. Diakses pada tanggal 23

Desember 2015 dari

http://www.lemonde.fr/societe/article_interactif/2007/05/15/les-discours-de-jacques-chirac_910136_3224_8.html

25. Laïcité. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari

<http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl03-209.html#timeline-2>

26. Laïcité. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari

<http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl03-209.html#timeline-2>

27. Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. *Legifrance*. Diakses pada tanggal 23 Desember 2015 dari

<http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000041797>

7

28. Berber, Myriam. (2004, 17 Januari). Mobilisation contre le projet de loi sur

la laïcité. *Rfi*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 dari

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/049/article_26188.asp

29. Raharjo, Agus. (2004, 19 Januari). Ratusan massa protes kebijakan prancis

larang jilbab. *Tempo*. Diakses pada tanggal 12 Desember 2015 dari

<http://nasional,tempo,co/read/news/2004/01/19/05838623/ratusan-massa->

protes-kebijakan-prancis-larang-jilbab

30. Pabottinggi, Mochtar., Basyar, H. Hamdan., Mashad, Dhurorudin., dkk.

(2008) *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. Hal. 82

31. Girls wear wigs to sidestep French headscarf ban (2004, 2 September).

Expatica. Diakses pada tanggal 17 Desember 2015 dari http://www.expatica.com/fr/news/country-news/Girls-wear-wigs-to-sidestepFrench-headscarf-ban_121669.html

32. French scarf ban comes into force. (2004, 2 September). *BBC NEWS.*

Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3619988.stm>

33. Gentleman, Amelie. (2004, 2 September). Muslim Schoolgirls risk careers for their symbolic headscarves. *The Guardian.* Diakses pada tanggal 15

Desember 2015 dari <http://www.theguardian.com/world/2004/sep/02/schools.schoolsworldwide>

34. Indrawan, Angga. (2015, 3 Mei). Pelajar Muslim di Prancis Diusir dari Kelas karena Jilbab dan Rok Panjang. *Republika.* Diakses pada tanggal 8 November 2015 dari

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/05/03/nnqfsi-pelajar-muslim-di-prancis-diusir-dari-kelas-karena-jilbab-dan-rok-panjang>

35. Ilham. (2015, 28 September). Siswa Muslim dan Yahudi Dikalungi Cakram Ketika Jam Makan Siang. *Republika.* Diakses pada tanggal 8 November 2015 dari

<http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/15/09/28/nvd72a361-siswa-muslim-dan-yahudi-dikalungi-cakram-ketika-jam-makan-siang>

36. Gentleman, Amelie. (2004, 2 September). Muslim Schoolgirls risk careers for their symbolic headscarves. *The Guardian.* Diakses pada tanggal 15 Desember 2015 dari

<http://www.theguardian.com/world/2004/sep/02/schools.schoolsworldwide>

Lampiran 1. Konstitusi 9 Desember 1905

Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

Version consolidée au 6 mars 2008

Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I^{er} : Principes.

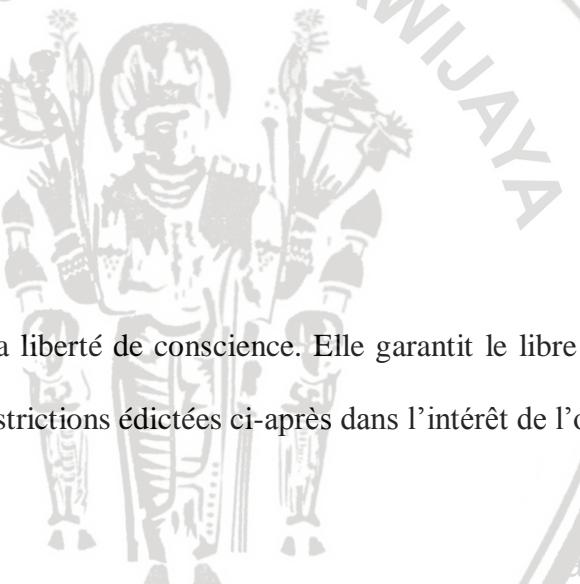
Article 1

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Article 2

La République ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les



établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.



Lampiran 2. Konstitusi 4 Oktober 1958

Constitution du 4 octobre 1958 (JORF n° 0238 du 5 octobre 1958, page 9151)

PRÉAMBULE et article 1er

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article 1er

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race

ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.



Lampiran 3. Undang-Undang *Laïcité* Tahun 2004

JORF n°65 du 17 mars 2004 page 5190

texte n°1

LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1)

NOR: MENX0400001L

ELI: [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/2004/3/15/MENX0400001L/jo/texte](https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/15/MENX0400001L/jo/texte)

Alias: [https://www.legifrance.gouv.fr/eli/2004/3/15/2004-228/jo/texte](https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/3/15/2004-228/jo/texte)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Il est inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-

5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de

signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une

appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure

disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »

Lampiran 4. Pidato Presiden Jacques Chirac 17 Desember 2003

Palais de l'Elysée, le 17 décembre 2003.

Monsieur le premier ministre, Messieurs les présidents des Assemblées, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs,

Le débat sur le principe de laïcité résonne au plus profond de nos consciences. Il renvoie à notre cohésion nationale, à notre aptitude à vivre ensemble, à notre capacité à nous réunir sur l'essentiel.

La laïcité est inscrite dans nos traditions. Elle est au cœur de notre identité républicaine. Il ne s'agit aujourd'hui ni de la refonder, ni d'en modifier les frontières. Il s'agit de la faire vivre en restant fidèle aux équilibres que nous avons su inventer et aux valeurs de la République.

Voilà plus de deux cents ans que la république se construit et se renouvelle en se fondant sur la liberté, garantie par la primauté de la loi sur les intérêts particuliers, sur l'égalité des femmes et des hommes, sur l'égalité des chances, des droits, des devoirs, sur la fraternité entre tous les Français, quelle que soit leur condition ou leur origine.

Dans notre République, chacun est respecté dans ses différences parce que chacun respecte la loi commune. Partout dans le monde, la France est ainsi reconnue comme la patrie des droits de l'homme.

Mais le monde change, les frontières s'abaissent, les échanges se multiplient. Dans le même temps, les revendications identitaires ou communautaires s'affirment ou s'exacerbent, au risque, souvent, du repli sur soi, de l'égoïsme, parfois même de l'intolérance.

Comment la société française saura-t-elle répondre à ces évolutions ? Nous y parviendrons en faisant le choix de la sagesse et du rassemblement des Français de toutes origines et de toutes convictions. Nous y parviendrons, comme

aux moments importants de notre histoire, en cherchant dans la fidélité à nos valeurs et à nos principes la force d'un nouveau sursaut.

Sursaut des consciences, pour redécouvrir avec fierté l'originalité et la grandeur de notre culture et de notre modèle français. Sursaut de l'action, pour inscrire au cœur de notre pacte républicain l'égalité des chances et des droits, l'intégration de tous dans le respect des différences. Sursaut collectif, pour qu'en ensemble, forts de cette diversité qui fait notre richesse, nous portions notre volonté, notre engagement, notre désir de vivre ensemble vers un avenir de confiance, de justice et de progrès.

C'est dans la fidélité au principe de laïcité, pierre angulaire de la République, faisceau de nos valeurs communes de respect, de tolérance, de dialogue, que j'appelle toutes les Françaises et tous les Français à se rassembler.

Notre peuple, notre Nation, notre République sont unis par des valeurs communes. Ces valeurs ne se sont pas imposées aisément. Elles ont parfois divisé les Français avant de contribuer à les réunir. Souvent, elles se sont forgées dans l'épreuve douloureuse de ces luttes qui traversent notre histoire et qui marquent notre mémoire.

Depuis les origines de la monarchie jusqu'aux tragédies du siècle dernier, la longue marche vers l'unité a dessiné notre territoire et forgé notre Etat. De l'Edit de Nantes aux lois de séparation des églises et de l'Etat, la liberté religieuse et la tolérance se sont frayé un chemin au travers des guerres de religion et des persécutions. Les droits de l'homme et ceux du citoyen ont été progressivement conquisis, consolidés, approfondis, depuis la Déclaration de 1789 jusqu'au Préambule de 1946. Ils l'ont été par la consécration du suffrage universel et le droit de vote des femmes, la liberté de la presse, la liberté d'association et bien sûr le combat pour faire reconnaître l'innocence du capitaine Dreyfus.

De l'abolition des priviléges, la nuit du 4 août, à celle de l'esclavage de 27 avril 1848, la république a proclamé avec force sa foi dans l'égalité et elle a bataillé sans relâche pour la justice sociale, avec ces conquêtes historiques que sont l'éducation gratuite et obligatoire, le droit de grève, la liberté syndicale, la sécurité sociale. Elle a su tendre la main, faire vivre l'égalité des chances, reconnaître le

mérite et permettre ainsi la promotion, jusqu'aux plus hautes fonctions, de femmes et d'hommes issus des milieux les plus modestes. Aujourd'hui, nous continuons d'avancer résolument pour consolider les droits des femmes.

Ces valeurs fondent la singularité de notre Nation. Ces valeurs portent notre voix haut et loin dans le monde. Ce sont ces valeurs qui font la France. Terre d'idées et de principes, la France est une terre ouverte, accueillante et généreuse. Uni autour d'un héritage singulier qui fait sa force et sa fierté, le peuple français est riche de sa diversité. Une diversité assumée et qui est au cœur de notre identité.

Diversité des croyances, dans cette vieille terre de chrétienté où s'est aussi enracinée une tradition juive qui remonte à près de deux mille ans. Terre de catholicisme qui a su dépasser les déchirements des guerres de religion et reconnaître finalement toute leur place aux protestants à la veille de la Révolution.

Terre d'ouverture enfin pour les Français de tradition musulmane qui sont partie intégrante de notre Nation.

Diversité des régions qui ont progressivement dessiné le visage de notre pays, de l'Ile-de-France aux duchés de Bretagne, d'Aquitaine, de Bourgogne, de l'Alsace et de la Lorraine jusqu'au comté de Nice, à la Caraïbe, l'océan indien ou le Pacifique Sud.

Et bien sûr, diversité de ces femmes et de ces hommes qui, à chaque génération, sont venus rejoindre la communauté nationale et pour qui la France a d'abord été un idéal avant de devenir une patrie.

Immigrés italiens, arrivés massivement avec la première révolution industrielle pour apporter à notre pays leur talent et leur énergie. Espagnols, chassés par les terribles déchirements des années trente et venus trouver refuge en France.

Portugais, arrivés dans les années soixante, pleins d'ardeur et de courage. Mais aussi Polonais, Arméniens, Asiatiques. Ressortissants du Maghreb et de l'Afrique Noire, qui ont si puissamment contribué à la croissance des "Trente Glorieuses"

"avant de faire souche sur notre sol. Tous ont contribué à forger notre pays, à le rendre plus fort et plus prospère, à accroître son rayonnement en Europe et dans le monde.

Notre drapeau, notre langue, notre histoire : tout nous parle de ces valeurs de tolérance et de respect de l'autre, de ces combats, de cette diversité qui font la grandeur de la France. Cette France, celle qui se bat pour la paix, pour la justice, pour les droits de l'homme, nous en sommes fiers. Nous devons la défendre.

Plutôt que de la remettre en question, chacun doit prendre la mesure de ce qu'elle lui apporte et se demander ce qu'il peut faire pour elle.

C'est pour que la France reste elle-même que nous devons aujourd'hui répondre aux interrogations et désamorcer les tensions qui traversent notre société. Ces facteurs de tensions, chacun les connaît.

Bien que porteuse de chances nouvelles, la mondialisation inquiète, déstabilise les individus, les pousse parfois au repli.

Au moment où s'affaissent les grandes idéologies, l'obscurantisme et le fanatisme gagnent du terrain dans le monde.

Entre la nation française et cette Europe des citoyens que nous souhaitons, chacun de nous doit redéfinir ses repères.

En même temps, la persistance voire l'aggravation des inégalités, ce fossé qui se creuse entre les quartiers difficiles et le reste du pays, font mentir le principe d'égalité des chances et menacent de déchirer notre pacte républicain.

Une chose est sûre : la réponse à ces interrogations n'est pas dans l'infiniment petit du repli sur soi ou du communautarisme. Elle est au contraire dans l'affirmation de notre désir de vivre ensemble, dans la consolidation de l'élan commun, dans la fidélité à notre histoire et à nos valeurs.

Face aux incertitudes du temps et du monde, face au sentiment d'impuissance, parfois à l'étreinte du désarroi, chacun recherche des références plus personnelles, plus immédiates : la famille, les solidarités de proximité, l'engagement associatif. Et cette aspiration est naturelle. Elle est même un atout. Elle témoigne de la capacité des Françaises et des Français à se mobiliser, à agir, à donner libre cours à leur énergie, à leurs initiatives.

Pour autant, ce mouvement doit trouver ses limites dans le respect des valeurs communes. Le danger, c'est la libération de forces centrifuges, l'exaltation des particularismes qui séparent. Le danger, c'est de vouloir faire primer les règles

particulières sur la loi commune. Le danger, c'est la division, discrimination, c'est la confrontation.

Regardons ce qui se passe ailleurs. Les sociétés structurées autour de communautés sont bien souvent la proie d'inégalités inacceptables.

Le communautarisme ne saurait être le choix de la France. Il serait contraire à notre histoire, à nos traditions, à notre culture. Il serait contraire à nos principes humanistes, à notre foi dans la promotion sociale par la seule force du talent et du mérite, à notre attachement aux valeurs d'égalité et de fraternité entre tous les Français.

C'est pourquoi je refuse d'engager la France dans cette direction. Elle y sacrifierait son héritage. Elle y compromettrait son avenir. Elle y perdrat son âme.

C'est pourquoi aussi, nous avons l'ardente obligation d'agir. Ce n'est ni dans l'immobilisme, ni dans la nostalgie, que nous retrouverons une nouvelle communauté de destin. C'est dans la lucidité, dans l'imagination et dans la fidélité à ce que nous sommes. * La France a su cette année encore porter, dans tous les domaines de tensions et de crise, sa parole de paix et de tolérance pour inviter les peuples qui se déchirent au respect de l'autre.

A l'intérieur de nos frontières, au cœur de notre société, sachons vivre ensemble en portant la même exigence, la même ambition de respect et de justice!

L'égalité des chances a de tout temps été le combat de la République. La ligne de front de ce combat passe désormais dans les quartiers. Comment demander à leurs habitants de se reconnaître dans la Nation et dans ses valeurs quand ils vivent dans des ghettos à l'urbanisme inhumain, où le non-droit et la loi du plus fort prétendent s'imposer

Avec le renforcement de la sécurité, avec le programme de rénovation urbaine pour détruire les " barres ", avec les zones franches destinées à ramener l'emploi et l'activité dans les cités, nous enrayons la fatalité et nous retrouvons l'espoir.

C'est, pour le Gouvernement et pour moi-même, un défi et une exigence majeurs.

Faire vivre l'égalité des chances, c'est aussi redonner toute sa force à notre tradition d'intégration en nous appuyant sur les réussites déjà acquises mais aussi en refusant l'inacceptable.

Beaucoup de jeunes issus de l'immigration, dont le français est la langue maternelle, et qui sont, la plupart du temps, de nationalité française, réussissent et se sentent à l'aise dans une société qui est la leur. Ils doivent être reconnus pour ce qu'ils sont, pour leur capacité, leur parcours, leur mérite. Ils veulent exprimer leurs succès, leur soif d'agir, leur insertion, leur pleine appartenance à la communauté nationale.

Ces réussites, il faut également les préparer avec les étrangers qui nous rejoignent légalement, en leur demandant d'adhérer à nos valeurs et à nos lois. C'est tout l'objet du contrat d'accueil et d'intégration mis en place par le gouvernement, à ma demande, et qui leur est proposé individuellement. Il leur donne accès à des cours de français, à une formation à la citoyenneté française, à un suivi social, en contrepartie de l'engagement de respecter scrupuleusement les lois de la République.

Ces réussites, il faut aussi les rendre possibles en brisant le mur du silence et de l'indifférence qui entoure la réalité aujourd'hui des discriminations. Je sais le sentiment d'incompréhension, de désarroi, parfois même de révolte de ces jeunes français issus de l'immigration dont les demandes d'emplois passent à la corbeille en raison de la consonance de leur nom et qui sont, trop souvent, confrontés aux discriminations pour l'accès au logement ou même simplement pour l'entrée dans un lieu de loisir.

Il faut une prise de conscience et une réaction énergique. Ce sera la mission de l'autorité indépendante chargée de lutter contre toutes les formes de discriminations qui sera installée dès le début de l'année prochaine.

Tous les enfants de France, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Ils doivent être reconnus comme tels, dans le droit mais surtout dans les faits. C'est en veillant au respect de cette exigence, c'est par la refondation de notre politique d'intégration, c'est par notre capacité à faire vivre l'égalité des chances que nous redonnerons toute sa vitalité à notre cohésion nationale. Nous le ferons aussi en faisant vivre le principe de laïcité qui est un pilier de notre Constitution. Il

exprime notre volonté de vivre ensemble dans le respect, le dialogue et la tolérance.

La laïcité garantit la liberté de conscience. Elle protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle assure à chacun la possibilité d'exprimer et de pratiquer sa foi, paisiblement, librement, sans la menace de se voir imposer d'autres convictions ou d'autres croyances. Elle permet à des femmes et à des hommes venus de tous les horizons, de toutes les cultures, d'être protégés dans leurs croyances par la République et ses institutions. Ouverte et généreuse, elle est le lieu privilégié de la rencontre et de l'échange où chacun se retrouve pour apporter le meilleur à la communauté nationale. C'est la neutralité de l'espace public qui permet la coexistence harmonieuse des différentes religions.

Comme toutes les libertés, la liberté d'expression des croyances ne peut trouver de limites que dans la liberté d'autrui et dans l'observation des règles de la vie en société. La liberté religieuse, que notre pays respecte et protège, ne saurait être détournée. Elle ne saurait remettre en cause la règle commune. Elle ne saurait porter atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est cet équilibre subtil, précieux et fragile, construit patiemment depuis des décennies, qu'assure le respect du principe de laïcité. Et ce principe est une chance pour la France. C'est pourquoi il est inscrit à l'article premier de notre Constitution. C'est pourquoi il

n'est pas négociable

Après avoir déchiré la France lors de l'adoption de la grande loi républicaine de séparation des églises et de l'Etat en 1905, une laïcité apaisée a permis de rassembler tous les Français. A l'épreuve de bientôt un siècle d'existence, elle a montré sa sagesse et recueille l'adhésion de toutes les confessions et de tous les courants de pensée.

Pourtant, malgré la force de cet acquis républicain, et comme l'ont notamment montré les travaux de la Commission présidée par Monsieur Bernard Stasi, Commission à laquelle je veux à nouveau rendre un hommage tout particulier, l'application du principe de laïcité dans notre société est aujourd'hui en débat.

Certes, il est rarement contesté. Beaucoup même s'en réclament. Mais sa mise en

œuvre concrète se heurte, dans le monde du travail, dans les services publics, en particulier à l'école ou à l'hôpital, à des difficultés nouvelles et grandissantes.

On ne saurait tolérer que, sous couvert de liberté religieuse, on conteste les lois et les principes de la République. La laïcité est l'une des grandes conquêtes de la République. Elle est un élément crucial de la paix sociale et de la cohésion nationale. Nous ne pouvons la laisser s'affaiblir. Nous devons travailler à la consolider.

Pour cela, nous devons assurer effectivement le même respect, la même considération à toutes les grandes familles spirituelles. À cet égard, l'Islam, religion plus récente sur notre territoire, a toute sa place parmi les grandes religions présentes sur notre sol. La création du Conseil Français du Culte Musulman permet désormais d'organiser les relations entre l'Etat et l'Islam de France. Les musulmans doivent avoir en France la possibilité de disposer de lieux de culte leur permettant de pratiquer leur religion dans la dignité et dans la tranquillité. Malgré les progrès récents, il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Un nouveau pas sera également franchi quand la formation d'Imams français sera assurée et permettra d'affirmer la personnalité d'un Islam de culture française.

Le respect, la tolérance, l'esprit de dialogue s'enracineront aussi avec la connaissance et la compréhension de l'autre auxquelles chacun d'entre nous doit attacher la plus grande importance. C'est pourquoi il me paraît aujourd'hui primordial de développer l'enseignement du fait religieux à l'école.

Il faut mener, aussi, avec vigilance et fermeté, un combat sans merci contre la xénophobie, le racisme et en particulier contre l'antisémitisme. Ne tolérons pas la banalisation de l'insulte ! Ne minimisons aucun geste, aucune attitude, aucun propos ! Ne laissons rien passer ! C'est une question de dignité.

Nous devons réaffirmer avec force la neutralité et la laïcité du service public. Celle de chaque agent public, au service de tous et de l'intérêt général, à qui s'impose l'interdiction d'afficher ses propres croyances ou opinions. C'est une règle de notre droit, car aucun Français ne doit pouvoir suspecter un représentant de l'autorité publique de le privilégier ou de le défavoriser en fonction de

convictions personnelles. De la même manière, les convictions du citoyen ne sauraient l'autoriser à récuser un agent public.

Il faut aussi réaffirmer la laïcité à l'école car l'école doit être absolument préservée.

L'école est au premier chef le lieu d'acquisition et de transmission des valeurs que nous avons en partage. L'instrument par excellence d'enracinement de l'idée républicaine. L'espace où l'on forme les citoyens de demain à la critique, au dialogue, à la liberté. Où on leur donne les clés pour s'épanouir et maîtriser leur destin. Où chacun se voit ouvrir un horizon plus large.

L'école est un sanctuaire républicain que nous devons défendre, pour préserver l'égalité devant l'acquisition des valeurs et du savoir, l'égalité entre les filles et les garçons, la mixité de tous les enseignements, et notamment du sport. Pour protéger nos enfants. Pour que notre jeunesse ne soit pas exposée aux vents mauvais qui divisent, qui séparent, qui dressent les uns contre les autres.

Il n'est pas question, bien sûr, de faire de l'école un lieu d'uniformité, d'anonymat, où seraient proscrits le fait ou l'appartenance religieuse. Il s'agit de permettre aux professeurs et aux chefs d'établissements, aujourd'hui en première ligne et confrontés à de véritables difficultés, d'exercer sereinement leur mission avec l'affirmation d'une règle claire.

Jusqu'à récemment, en vertu d'usages raisonnables et spontanément respectés, il n'avait jamais fait de doute pour personne que les élèves, naturellement libres de vivre leur foi, ne devaient pas pour autant venir à l'école, au collège ou au lycée en habit de religion.

Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles règles ni de déplacer les frontières de la laïcité. Il s'agit d'énoncer avec respect mais clairement et fermement une règle qui est dans nos usages et dans nos pratiques depuis très longtemps.

J'ai consulté. J'ai étudié le rapport de la Commission Stasi. J'ai examiné les arguments de la Mission de l'Assemblée nationale, des partis politiques, des autorités religieuses, des grands représentants des grands courants de pensée.

En conscience, j'estime que le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics.

Les signes discrets, par exemple une croix, une étoile de David, ou une main de Fatima, resteront naturellement possibles. En revanche les signes ostensibles, c'est-à-dire ceux dont le port conduit à se faire remarquer et reconnaître immédiatement à travers son appartenance religieuse, ne sauraient être admis. Ceux-là -le voile islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, la Kippa ou une croix manifestement de dimension excessive- n'ont pas leur place dans les enceintes des écoles publiques. L'école publique restera laïque.

Pour cela une loi est évidemment nécessaire. Je souhaite qu'elle soit adoptée par le Parlement et qu'elle soit pleinement mise en oeuvre dès la rentrée prochaine. Dès maintenant je demande au gouvernement de poursuivre son dialogue, notamment avec les autorités religieuses, et d'engager une démarche d'explication, de médiation et de pédagogie.

Notre objectif, c'est d'ouvrir les esprits et les coeurs. C'est de faire comprendre aux jeunes concernés les enjeux de la situation et de les protéger contre les influences et les passions qui, loin de les libérer ou de leur permettre d'affirmer leur libre arbitre, les contraignent ou les menacent.

Dans l'application de cette loi, le dialogue et la concertation devront être systématiquement recherchés, avant toute décision.

En revanche, et la question a été soulevée, je ne crois pas qu'il faille ajouter de nouveaux jours fériés au calendrier scolaire, qui en compte déjà beaucoup. De plus, cela créerait de lourdes difficultés pour les parents qui travaillent ces jours-là. Pour autant, et comme c'est déjà largement l'usage, je souhaite qu'aucun élève n'ait à s'excuser d'une absence justifiée par une grande fête religieuse comme le Kippour ou l'Aït-El-Kebir, à condition que l'établissement en ait été préalablement informé. Il va de soi aussi que des épreuves importantes ou des examens ne doivent pas être organisés ces jours-là. Et des instructions en ce sens seront données aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale.

Il faut aussi rappeler les règles élémentaires du vivre ensemble. Je pense à

l'hôpital où rien ne saurait justifier qu'un patient refuse, par principe, de se faire soigner par un médecin de l'autre sexe. Il faudra que la loi vienne consacrer cette règle pour tous les malades qui s'adressent au service public.

De la même manière, le ministre du travail devra engager les concertations nécessaires et, si besoin, soumettre au Parlement une disposition permettant au chef d'entreprise de réglementer le port de signes religieux, pour des impératifs tenant à la sécurité -cela va de soi- ou aux contacts avec la clientèle.

D'une manière générale, je crois souhaitable qu'un "*Code de la laïcité*" réunisse tous les principes et les règles relatifs à la laïcité. Ce code sera remis notamment à tous les fonctionnaires et agents publics le jour de leur entrée en fonction.

Par ailleurs, le Premier ministre installera auprès de lui un Observatoire de la laïcité chargé d'alerter les Français et les pouvoirs publics sur les risques de dérive ou d'atteinte à ce principe essentiel. * Enfin, notre combat pour les valeurs de la République doit nous conduire à nous engager résolument en faveur des droits des femmes et de leur égalité véritable avec les hommes. Ce combat est de ceux qui vont dessiner le visage de la France de demain. Le degré de civilisation d'une société se mesure d'abord à la place qu'y occupent les femmes.

Il faut être vigilant et intransigeant face aux menaces d'un retour en arrière et elles existent.

Nous ne pouvons pas accepter que certains, s'abritant derrière une conception tendancieuse du principe de laïcité, cherchent à saper ces acquis de notre République que sont l'égalité des sexes et la dignité des femmes. Je le proclame très solennellement : la République s'opposera à tout ce qui sépare, à tout ce qui retranche, à tout ce qui exclut ! La règle, c'est la mixité parce qu'elle rassemble, parce qu'elle met tous les individus sur un pied d'égalité, parce qu'elle se refuse à distinguer selon le sexe, l'origine, la couleur, la religion.

En matière de droits des femmes, notre société a encore beaucoup de progrès à faire. La nouvelle frontière de la parité, c'est désormais l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chacun doit en prendre conscience et agir dans ce sens. Et je compte m'y engager personnellement dans les prochaines semaines.

Mesdames

et

Messieurs,

Les débats sur la laïcité, l'intégration, l'égalité des chances, le droit des femmes, nous posent une même question : quelle France voulons-nous, pour nous et pour nos enfants ? Nous avons reçu en héritage un pays riche de son histoire, de sa langue, de sa culture, une Nation forte de ses valeurs et de ses idéaux.

Notre pays, la France, chacun doit en être fier. Chacun doit se sentir dépositaire de son héritage. Chacun doit se sentir responsable de son avenir.

Sachons transformer les interrogations d'aujourd'hui en atouts pour demain. En recherchant résolument l'unité des Français. En confirmant notre attachement à une laïcité ouverte et généreuse telle que nous avons su l'inventer année après année. En faisant mieux vivre l'égalité des chances, l'esprit de tolérance, la solidarité. En menant résolument le combat pour les droits des femmes. En nous rassemblant autour des valeurs qui ont fait et qui font la France.

C'est ainsi que nous resterons une Nation confiante, sûre, forte de sa cohésion.

C'est ainsi que nous pourrons réaffirmer l'ambition qui nous rassemble de bâtir, pour notre pays et pour nos enfants, un avenir de progrès et de justice.

C'est l'un des grands défis lancé à nos générations. Ce défi, nous pouvons, nous devons, nous allons le relever ensemble.

Tous ensemble.

Je vous remercie.

Lampiran 5. Curriculum Vitae

Nama : Nuraini Indah Wardani

NIM : 125110301111001

Program Studi : S1 Bahasa dan Sastra Prancis

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Juli 1994

Alamat Asal : Jalan Harapan No. 4 RT 002 RW 003 Bintaro

Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta 12330

Alamat E-mail : nurainiindahwardani@gmail.com

Nomor Handphone : 081389091803

Pendidikan : TK Niaga Ekasari (1998 – 2000)

SDS Niaga Ekasari (2000 – 2006)

SMPN 161 Jakarta (2006 – 2009)

SMAN 47 Jakarta (2009 – 2012)

Universitas Brawijaya (2012 – 2016)

Pengalaman Organisasi :

• 2013 – 2014 : Bendahara I HIMAPRODI Bahasa dan Sastra Prancis

• 2014 – 2015 : Bendahara II HIMAPRODI Bahasa dan Sastra Prancis

• 2016 : Bendahara Umum Institut Karate-Do Indonesia Ranting Harapan Bintaro

Lampiran 6. Berita Acara Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA

Jalan Veteran Malang 65145, Indonesia, Telp. +62341-575875, Fax. +62341-575822

E-mail : fib_ub@ub.ac.id <http://www.fib.ub.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama	:	Nuraini Indah Wardani
2. NIM	:	125110301111001
3. Program Studi	:	Bahasa dan Sastra Prancis
4. Topik Skripsi	:	Sejarah
5. Judul Skripsi	:	Penerapan Undang-Undang <i>Laïcité</i> Tahun 2004 dan Posisi Kaum Wanita Muslim Imigran Magribi pada Era Pemerintahan Presiden Jacques Chirac (1995 – 2007) di Prancis
6. Tanggal Mengajukan	:	08 September 2015
7. Tanggal Selesai Revisi	:	30 Maret 2016
8. Nama Pembimbing	:	Lusia Neti Harwati, M.Ed.
9. Keterangan Konsultasi	:	

No.	Tanggal	Materi	Pembimbing	Paraf
1	08 September 2015	Pengajuan Judul	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
2	18 September 2015	Pengajuan Bab 1	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
3	21 September 2015	Revisi Bab 1	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
4	28 September 2015	Pengajuan Bab 2	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
5	5 Oktober 2015	Revisi Bab 2	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
6	12 Oktober 2015	Pengajuan Bab 3	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
7	20 Oktober 2015	Revisi Bab 1-3	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
8	27 Oktober 2015	ACC Seminar	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	

		Proposal		
Universitas Brawijaya 9	14 November 2015	Revisi Seminar Proposal	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 10	15 Februari 2016	Pengajuan Bab 4	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 11	22 Februari 2016	Revisi Bab 4, Pengajuan Bab 5	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 12	4 Maret 2016	Revisi Bab 4 – 5	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 13	8 Maret 2016	ACC Seminar Hasil	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 14	21 Maret 2016	Revisi Seminar Hasil, ACC Ujian Skripsi	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	
Universitas Brawijaya 15	30 Maret 2016	Revisi Akhir Ujian Skripsi	Lusia Neti Harwati, M.Ed.	

10. Telah dievaluasi dan diuji dengan nilai :

Malang, 31 Maret 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra

Ismatul Khasanah, M.Ed., Ph.D.

NIP. 19750518 200501 2 001

Dosen Pembimbing

Lusia Neti Harwati, M.Ed.

NIP. 19780607 200212 2 002